

PENYELESAIAN KONFLIK AFGHANISTAN-PAKISTAN : SEBUAH PENDEKATAN REKONSILIASI



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

oleh:

**UMIYATI HARIS
E131 12 005**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2016**

ABSTRAKSI

Umiyati Haris, E 131 12 005, dengan “Penyelesaian Konflik Afghanistan-Pakistan: Sebuah Pendekatan Rekonsiliasi”, di bawah bimbingan **Muhammad Nasir Badu, Ph.D** selaku pembimbing I dan **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.** selaku pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini menggambarkan tentang konflik Afghanistan dan Pakistan hingga upaya penyelesaian konflik kedua negara melalui proses rekonsiliasi. Pembahasan difokuskan pada penyelesaian konflik Afghanistan dan Pakistan. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif-Analitik. Adapun teknik pengumpulan data, penulis memperoleh dari wawancara dan studi pustaka yang menelaah sejumlah buku, jurnal, dokumen, surat kabar dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik diantara kedua negara mengalami tahap peningkatan (eskalasi) maupun tahap penurunan konflik (de-eskalasi) saat munculnya pemicu konflik yang baru dan aktor yang bertambah. Konflik Afghanistan dan Pakistan juga mengalami tahap penurunan konflik ketika pihak-pihak yang bertikai memutuskan untuk mengakhiri penyerangan, seperti gencatan senjata dan berdialog. Berbagai upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan untuk menciptakan perdamaian yang permanen di antara kedua negara tersebut. Selain gencatan senjata, mediasi PBB, penyelesaian konflik melalui beberapa dialog juga telah ditempuh oleh Afghanistan dan Pakistan. Penyelesaian konflik melalui dialog termasuk dalam proses rekonsiliasi. Hal tersebut merupakan salah satu indikator yang mengukur efektivitas rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik Afghanistan dan Pakistan.

Kata kunci : Konflik, eskalasi konflik, de-eskalasi konflik, penyelesaian konflik, gencatan senjata, dialog, rekonsiliasi

ABSTRACT

Umiyati Haris, E 131 12 005, with “Conflict Settlement of Afghanistan and Pakistan: A Reconciliation Approach”, at the direction of guidance **Muhammad Nasir Badu, Ph.D** as leader I and **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.** as leader II, at International Relation Departement, Social and Political Faculty, Hasanuddin University.

This study explains about conflict of Afghanistan and Pakistan until many efforts conflict settlement two countries by reconciliation process. The discussion focuses on Afghanistan and Pakistan conflict settlement. The research type that author use in this study is Descriptive-Analytic. The data capture technical in this study are getting from interview and library research which are come from books, journals, documents, newspapers and scientific article. The research result of this conflict between two countries point out that conflict of those two countries go through with escalation when the new manifest conflict appeared and actors are increasingly. Conflict Afghanistan and Pakistan work out become de-escalation when the parties decided to end the attack, such as cease-fire and dialogue. There are many various efforts of conflict settlement that had been done to create permanent peace between those two countries. Besides cease-fire, mediation by UN, conflict settlement between Afghanistan and Pakistan has also reached by some dialogues. Conflict settlement by dialogue include in reconciliation process. It is one of some indicators that measure the effectiveness of reconciliation in Afghanistan and Pakistan conflict settlement.

Keywords : Conflict, conflict escalation, conflict de-escalation, conflict settlement, cease-fire, dialogue, reconciliation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup secara berdampingan dalam suatu kelompok. Manusia cenderung menempatkan diri mereka ke dalam suatu kelompok yang memiliki kepentingan yang hendak dicapai bersama. Selain sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk individu yang memiliki kebutuhan dan posisi yang berbeda dalam kelompoknya. Kebutuhan yang berbeda dari setiap individu tentunya memunculkan benturan dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, konflik menghiasi kehidupan sosial individu-individu, individu-kelompok, kelompok-kelompok, hingga terjadi pada negara dengan negara lain.

Konflik merupakan suatu gejala perubahan sosial dalam masyarakat, bangsa dan negara yang terjadi secara terus-menerus. Perubahan sosial didasari oleh masyarakat dalam suatu negara yang heterogen, sehingga memiliki kebutuhan dan kepentingan yang beragam. Konflik terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kebutuhan antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompoknya serta antar-kelompok dalam suatu masyarakat. Konflik juga terjadi jika terdapat benturan kepentingan di antara pihak-pihak yang bertikai.

Konflik yang terjadi di Afghanistan selama kurang lebih 60 tahun telah melibatkan banyak negara. Salah satunya adalah Pakistan sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Konflik kedua negara tersebut selalu dipicu oleh masalah perbatasan selain masalah etnis atau perbedaan

ideologi. Tetapi, akar penyebab konflik bukan hanya masalah perbatasan akan tetapi warisan kolonial, dimana kedua negara menjadi alat politik oleh Inggris dan Kekaisaran Rusia¹ yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut.

Konflik tersebut tentunya memiliki akar penyebab yang laten dan terjadi sejak jaman kolonial Eropa di wilayah Timur-Tengah. Warisan kolonial telah meninggalkan perang saudara yang berkepanjangan antara Afghanistan dan Pakistan.

Secara historis kedua negara, Kekaisaran Rusia memiliki kepentingan di wilayah India yang dikuasai oleh Inggris sejak abad ke-18. Wilayah India yang berbatasan dengan Afghanistan merupakan daerah yang menjadi perhatian Inggris terhadap ancaman dari Kekaisaran Rusia (saat ini: Federasi Rusia) pada tahun 1866. Hal ini merupakan keinginan Kekaisaran Rusia (1721-1917) untuk memperluas wilayahnya ke Asia, salah satunya adalah India.

Akhirnya, Inggris memisahkan dan membentuk kerajaan Pakistan di wilayah Afghanistan namun menjadi bagian dari kerajaan India pada tahun 1893. Pemisahan ini lalu ditandai dengan nama *Durand Line*, yang menjadi batas di antara kedua negara.² Pemisahan ini bertujuan untuk membendung pengaruh Kekaisaran Rusia di India dengan menjadikan Pakistan sebagai kerajaan dari India yang pada saat itu dikuasai oleh Inggris. Akan tetapi ketakutan Inggris

¹ Nama Rusia pada tahun **1721–1917**, lihat <http://mediaonlinenews.com/dunia/10-kerajaan-terbesar-dunia-dalam-sejarah>, diakses pada Rabu, 22/April/2015. Adapun nama dinasti yang berkuasa pada saat itu adalah Dinasti Romanov.

² Brad L. Brasseur, "Recognizing the Durand Line", *paper*, New York, *The East West Institute*, 2011, hal. 06.

menimbulkan terjadinya perang di Afghanistan yang lebih dari satu kali, yaitu pada tahun 1819 dan 1878.

Hingga kini, situasi politik Afghanistan dan Pakistan kurang stabil dan masih terus berlangsungnya konflik dengan pemicu yang baru. Sejak invasi AS ke Afghanistan dari tahun 2001 hingga sekarang, pergerakan Taliban tidak hanya di Afghanistan tetapi juga di wilayah perbatasan Pakistan. Bahkan tercatat terjadi peningkatan pesat intensitas serangan Taliban baik di Afghanistan maupun Pakistan dan menewaskan banyak korban sipil maupun militer. Selain itu, konflik Taliban menyebabkan negara-negara seregional ikut terlibat dalam konflik ini, bahkan menimbulkan rasa saling curiga antar negara-negara yang dalam notabene masih satu regional.³

Permasalahan historis menjadi laten dari konflik kedua negara tersebut. Hasilnya adalah kerugian kedua negara dalam hal anggaran pertahanan serta tidak stabilnya kondisi politik maupun ekonomi dalam negeri. Hal ini menyebabkan munculnya efek dari konflik itu sendiri seperti ancaman dan rasa takut bagi penduduk sipil kedua negara. Selain itu, munculnya rasa saling curiga di antara pemerintah kedua negara tidak dapat dielakkan.

Rentetan konflik di antara dua negara yang berada di kawasan Asia Selatan ini menjadi sangat panjang dengan memunculkan pemicu baru hingga aktor yang beragam. Tidak jarang efek yang dihasilkan dari konflik ini timbul dan tenggelam cukup beragam dari timbulnya kecurigaan di antara kedua pemerintah negara, kekerasan, demonstrasi, hingga ketakutan bagi penduduk sipil di kedua negara.

³ Waslat Hasrat-Nazimi, "Taliban Manfaatkan Celah Keamanan", *DW Akademie*, 22 Januari, 2013, (<http://www.dw.de/taliban-manfaatkan-celah-keamanan/a-16540004>), diakses pada 14 April 2015).

Proses timbul dan tenggelamnya konflik di kedua negara diselingi oleh proses perdamaian yang disebut juga resolusi konflik. Proses ini kemudian terlihat dari kebijakan salah satu atau kedua negara untuk membicarakan permasalahan dalam bentuk perjanjian perdamaian. Sehingga, proses sosial dari kedua negara yang berkonflik ikut berubah dengan konflik yang terjadi selama beberapa tahun, lalu muncul resolusi konflik, setelah itu muncul pemicu yang baru, konflik kembali, hingga menghasilkan resolusi konflik yang baru.

Konflik yang berlangsung terus-menerus telah menimbulkan banyak kerugian bagi Afghanistan maupun Pakistan. Mulai dari rasa saling curiga diantara pemerintah kedua negara hingga anggaran masing-masing negara yang banyak digelontorkan untuk bidang pertahanan dan keamanan dibanding menggunakan untuk membangun negeri di bidang kesehatan; pendidikan; sarana dan prasarana. Jika konflik kedua negara tidak dapat diredam dalam jangka waktu yang panjang, maka kerugian akan bertambah banyak dan memberikan dampak yang luas pada masyarakat sipil. Oleh karena itu, penyelesaian konflik kedua negara memiliki peranan yang besar bagi hubungan diplomatik kedua negara ke depannya.

Penyelesaian konflik bermacam-macam bentuknya, seperti mediasi; negosiasi; rekonsiliasi; *peace keeping*; hingga *peace building*. Dalam menganalisa konflik Afghanistan dan Pakistan, penulis menggunakan rekonsiliasi dalam melihat penyelesaian konflik diantara kedua negara. Rekonsiliasi merupakan upaya mentransformasi konflik ke dalam bentuk damai yang diharapkan mampu berlangsung secara permanen. Rekonsiliasi adalah upaya penyelesaian konflik

dari kondisi *negative peace* menuju *positive peace*, di mana terdapat keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi menunjukkan bahwa masing-masing pihak yang bertikai telah sadar terhadap konflik yang berlarut-larut selama puluhan tahun dan tentu telah menimbulkan banyak kerugian. Pihak yang bertikai, dalam hal ini Afghanistan dan Pakistan berusaha untuk menemukan akar permasalahan dari konflik yang selalu muncul oleh pemicu yang baru. Dengan mengupayakan pembicaraan damai dengan kedua pihak tentu akan memunculkan rasa saling percaya untuk meredam perselisihan dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

Upaya kedua negara dalam menyelesaikan konflik menunjukkan bahwa perdamaian dalam jangka waktu yang lama sangat dibutuhkan. Banyak hal yang dapat dicapai oleh masing-masing negara dengan terwujudnya perdamaian yang permanen, seperti meningkatkan perekonomian masing-masing negara; membangun infrastruktur; peningkatan indeks pembangunan SDM; hingga angka kriminalitas, kelaparan, gizi buruk dan tingkat pendidikan yang rendah dapat berkurang. Hal itu dapat dicapai melalui upaya penyelesaian konflik yang salah satunya dengan menggunakan rekonsiliasi sebagai jalan menuju perdamaian positif.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Konflik yang terjadi antara Afghanistan dan Pakistan hingga saat ini membuat akar penyebab masalah di antara kedua negara menjadi tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh munculnya aktor-aktor baru serta pemicu yang baru pula. Sehingga penyebab awal munculnya konflik menjadi laten diiringi dengan waktu konflik yang cukup lama serta munculnya berbagai aktor dan kepentingan yang berbeda dari pihak-pihak yang berkonflik.

Konflik yang berlangsung cukup lama tersebut perlu untuk diketahui akar penyebab konflik yang bersifat laten dan merupakan hal yang sebenarnya menjadi penyebab asli dari konflik diantara kedua negara. Sehingga akan lebih meningkatkan kesadaran masing-masing pihak yang bertikai untuk menghilangkan potensi konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Konflik antara Afghanistan dan Pakistan merupakan jenis konflik internasional dengan unit analisis negara dengan negara (*state-state*). Meskipun pihak-pihak yang bertikai bukan hanya berasal dari kelompok *state*, seperti kelompok sosial, namun hal yang difokuskan dalam penelitian ini adalah penyelesaian konflik yang mengatasnamakan kedua negara tersebut dalam hal konflik internasional.

Konflik internasional dapat dipahami sebagai perangkat masalah keputusan interaktif dan saling tergantung yang timbul dalam konteks politik dunia.⁴ Dalam hal ini, konteks membentuk, namun tidak menentukan. Pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pemimpin-lah yang akan mengubah konteks tatanan politik

⁴ Walter Carlsnaes, Thomas Risse & Beth A Simmons, *Handbook Hubungan Internasional*, terj. Imam Baehaqie, Bandung, Nusa Media, 2013, hal. 602.

dunia. Pilihan-pilihan tersebut kemudian berpengaruh pada cepat atau lambatnya penyelesaian suatu konflik dalam lingkup internasional. Sikap dan kepentingan para aktor yang berkonflik menentukan pembahasan dan keputusan yang dibawa ke dalam tataran internasional.

Untuk mengetahui penyelesaian konflik antara Afghanistan dan Pakistan, penulis menggunakan Rekonsiliasi sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian yang permanen dan memulihkan kembali hubungan persahabatan kedua negara. Penelitian terhadap penyelesaian konflik ini tidak menuntut untuk memunculkan proses rekonsiliasi, namun rekonsiliasi digunakan untuk membuktikan bahwa dalam penyelesaian konflik terdapat proses itu atau tidak.

Rekonsiliasi bertujuan agar konflik yang terjadi antara Afghanistan dan Pakistan tidak berlanjut lagi dan dapat diredam dalam jangka waktu yang lama. Munculnya aktor-aktor baru dalam konflik ini tentu membuat perselisihan semakin panjang dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya. Akan tetapi, dalam proses penyelesaian suatu konflik terdapat proses rekonsiliasi yang berlangsung meskipun beberapa aktor menimbulkan pemicu konflik yang baru atau keadaan masih berada dalam kondisi yang kurang stabil (*negative peace*). Sehingga, rekonsiliasi merupakan upaya yang terus-menerus dicapai oleh Afghanistan dan Pakistan untuk mengembaikan hubungan persahabatan negara tetangga yang *se-region* serta mewujudkan kondisi damai dalam jangka waktu yang lama.

Konflik antara Afghanistan dan Pakistan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut membuat penulis membatasi waktu terjadinya konflik, yaitu antara tahun 2004 hingga 2015. Alasan penulis mengambil data dari tahun 2004-2015, yaitu waktu tersebut merupakan pasca tragedi 9/11. Dalam rentang waktu tersebut terdapat proses meletusnya konflik di perbatasan kedua negara untuk melawan aksi terorisme hingga munculnya beberapa penyelesaian konflik. Adapun penyelesaian konflik kedua negara, penulis mengambil data dari tahun 2013 hingga 2015 yang merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini. Sehingga, diperoleh analisa dan penyelesaian konflik dengan cara rekonsiliasi yang lebih dalam serta dilengkapi data-data yang akurat.

Adapun rumusan masalah yang ditarik dari batasan masalah pada paragraf sebelumnya, yaitu :

1. Mengapa Rekonsiliasi digunakan dalam melihat penyelesaian konflik Afghanistan-Pakistan?
2. Bagaimana efektivitas Rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik antara Afghanistan dan Pakistan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian tentang penyelesaian konflik Afghanistan-Pakistan melalui pendekatan rekonsiliasi, yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan penggunaan Rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik Afghanistan - Pakistan.
2. Untuk mengetahui efektivitas Rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik antara Afghanistan dan Pakistan.

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu diharapkan dapat menambah informasi tentang konflik yang terjadi di wilayah Asia Selatan, yaitu antara Afghanistan dan Pakistan beserta penyelesaiannya dilihat dari upaya rekonsiliasi yang sedang berlangsung diantara pihak-pihak yang bertikai.

D. Kerangka Konseptual

Ilmu Hubungan Internasional mengkaji tentang hubungan antar negara dan interkasinya, baik di bidang politik, perdagangan, maupun sosial budaya. Hubungan politik antar negara biasanya diwarnai dengan konflik selain kerjasama yang terjalin melalui suatu rezim internasional. Konflik antar negara terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan masing-masing negara. Tidak hanya itu, konflik antara kedua negara juga dapat terjadi sangat kompleks dengan benturan kepentingan, kebutuhan serta posisi dalam kelompok-kelompok sosial maupun organisasi antar-kelas yang terdapat dalam sebuah negara. Kelompok-kelompok tersebut membuat negara lain merasa terancam dengan keberadaan mereka.

Konflik yang terjadi di antara dua negara, seperti halnya Afghanistan dan Pakistan merupakan jenis konflik Internasional. Konflik terjadi bukan hanya karena perbedaan kepentingan kedua negara, melainkan munculnya pihak internal Afghanistan, dalam hal ini kelompok sosial dan gerakan politik yang memiliki kepentingan berbeda dengan pemerintah. Sementara itu, konflik Afghanistan dan Pakistan juga menjadi rumit dengan munculnya pihak eksternal dari pihak Pakistan, dalam hal ini NATO dan pasukan perdamaian PBB yang membantu pemerintah Pakistan untuk menjaga perbatasan wilayah dengan Afghanistan serta

kepentingan lainnya terhadap kelompok Taliban. Sehingga, tingkat analisis tidak hanya mencakup ‘negara’ dengan ‘negara’ (*state-state*), akan tetapi juga perlu dianalisis di tingkat negara dengan kelompok sosial atau kelas-kelas (individu dan kelompok) yang ada dalam negara tersebut.

Penelitian mengenai konflik Afghanistan dan Pakistan ini mengarah pada penyelesaian konflik. Untuk itu, diperlukan pembahasan mengenai konflik itu sendiri. Berbagai teori dan pandangan tentang konflik yang ditinjau dari aspek Sosiologis.

Menurut **Maswadi Rauf**, konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial.⁵

Sementara itu, konflik menurut **Miall**, yaitu

Pengerjaan tujuan yang saling bertentangan dari kelompok-kelompok yang berbeda, menunjukkan rentangan dari kelompok-kelompok yang berbeda, menunjukkan rentangan waktu yang lebih luas dan kelas perjuangan yang lebih besar dibandingkan dengan konflik bersenjata, entah itu diikuti oleh sarana perdamaian ataupun dengan menggunakan kekuatan (Sejumlah ahli teori membedakan antara pertikaian dengan kepentingan yang dapat dinegosiasikan dan yang dapat diatasi oleh kompromi, dan konflik yang lebih dalam melibatkan kebutuhan manusia dan hanya dapat diselesaikan dengan menghilangkan penyebab tersembunyinya.)⁶

⁵ Ngesti Viana, “Konflik Internal Tim Sukses Partai Golkar pada Pemilihan Bupati Luwu Utara Tahun 2010”, Skripsi, Makassar, Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2010, hal. 13.

⁶ Megawati, “Gerakan Separatis Pattani sebagai Faktor Konflik dan Pengaruhnya Terhadap Aspek Keamanan di Thailand”, Skripsi, Makassar, Program Reguler Sore Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2008, hal. 09.

Konflik berdasarkan kedua pendapat tersebut menunjukkan sebuah gejala yang senantiasa ada dalam masyarakat, dimana masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Hal itu menjadi penyebab munculnya konflik yang berdampak luas dengan waktu yang lama. Sehingga, penyelesaiannya pun ada yang ditempuh melalui cara kekerasan atau dengan cara perdamaian.

Menurut teori konflik, masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.⁷

Teori konflik sosial pada paragraf sebelumnya menekankan kata 'kepentingan' sebagai faktor penyebab terjadinya konflik. Kepentingan ini dimiliki oleh masyarakat sebagai suatu sistem dalam negara. Begitu pula halnya negara yang juga memiliki kepentingan yang hendak dicapai, hal ini biasa disebut dengan kepentingan nasional (*national interest*).

Kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara didasarkan pada pemenuhan kebutuhan nasional serta kekuatan sumber daya yang dimiliki sebagai bahan untuk bersaing di dunia internasional. Sehingga, teori konflik ini erat kaitannya dengan konflik antar kedua negara yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Saat kepentingan mereka berbenturan satu sama lain, maka di saat itulah terjadi konflik.

⁷ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, hal. 364.

Untuk menganalisis suatu konflik, dibutuhkan alat bantu analisis konflik. Alat bantu atau model analisis konflik digunakan sebagai proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang.⁸ Analisis konflik bukan merupakan kegiatan satu kali saja, namun berlangsung terus menerus, sehingga dapat menyesuaikan tindakan penanganan dengan berbagai faktor, dinamika dan keadaan.

Terdapat alat bantu analisa konflik dalam Ilmu Hubungan Internasional, yaitu model Segitiga Johan Galtung, model Bawang, Pohon Konflik, model Eskalasi dan De-eskalasi Konflik, Peta Konflik, Roda Konflik, *Multi-Casual Role model*, hingga *The Hourglass model*. Akan tetapi, dalam menganalisa konflik Afghanistan-Pakistan di makalah ini penulis menggunakan model Eskalasi dan De-eskalasi konflik.

Menurut model analisa konflik Eskalasi dan De-eskalasi, konflik merupakan suatu proses dinamis yang dapat berkembang dan berubah secara cepat.⁹ Konflik tersebut juga bersifat laten atau tersembunyi dalam waktu yang cukup lama pula, kemudian secara tiba-tiba meledak dan muncul ke permukaan yang menghasilkan kekerasan, ketakutan, rasa saling curiga dan sebagainya.

⁸ Simon Fisher, et.al, *Mengelola Konflik*, terj. SN Kartika Sari, et.al, The British Council, 2001, hal. 30.

⁹ Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse & Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution*, pdf, New York, Polity, 2011, hal. 12.

Proses eskalasi konflik bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi.¹⁰ Hal tersebut membuat munculnya isu-isu konflik baru seperti konflik internal suatu negara, pertentangan ideologi kelompok sosial dengan pemerintah suatu negara, hingga penyerangan negara yang satu ke negara yang lainnya dengan alasan keamanan nasional. Sehingga, eskalasi konflik menunjukkan proses munculnya beragam pemicu hingga sampai ke titik di mana penyerangan atau ‘war’ sebagai puncaknya.

Seperti halnya eskalasi konflik, de-eskalasi terjadi dengan pemecahan masalah konflik yang tidak terduga dengan perubahan klimaks konflik yang semakin mundur, dengan kenaikan di suatu area atau level yang menjadi penyeimbang oleh keadaan yang kembali normal dan terdapat keikutsertaan atau pengaruh pihak ketiga dalam penyelesaian konflik yang sedang berlangsung.¹¹

Proses konflik yang digambarkan dalam model konflik tersebut, yaitu tahap eskalasi : *differences; contradiction; polarization; violence/war* serta tahap de-eskalasi : *casefire; agreement; normalization, reconciliation*.¹²

Tahap awal eskalasi konflik berupa *differences* yang merupakan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam suatu kelompok, seperti posisi, kebutuhan, kepentingan hingga ideologi. Proses awal ini merupakan bagian dari perubahan sosial menuju kemunculan sebuah *contradiction* atau pertentangan yang bersifat laten atau tidak terlihat. Pertentangan yang terjadi membuat masing-masing pihak ingin mencapai tujuannya dan berusaha agar pihak lain tidak mendahuluinya, namun proses ini masih seperti menyimpan bara api yang memunculkan rasa

¹⁰ *Ibid*, hal. 12-13.

¹¹ *Ibid*, hal. 13.

¹² *Ibid*, hal. 13.

saling curiga satu sama lain. Proses selanjutnya adalah *polarization*, yaitu kubu-kubu dengan kepentingan yang sama akan terbentuk dengan jelas serta, di mana pertentangan akan semakin jelas sehingga membuat konflik menjadi terlihat atau *manifest*. Hingga pada puncaknya terjadi *violence* atau *direct war*.

Setelah itu, tahap de-eskalasi mulai muncul dengan *casefire* sebagai proses pertama. Tahap ini biasa disebut dengan gencatan senjata di mana perdamaian negatif (*negative peace*) mulai terlihat. Perdamaian negatif berfokus pada tidak adanya kekerasan langsung, seperti perang. Pencegahan dan eliminasi penggunaan kekerasan membutuhkan pemecahan perbedaan melalui negosiasi atau mediasi daripada memilih paksaan fisik.¹³ Selain itu, suatu kondisi yang dapat disebut perdamaian negatif ketika konflik masih bergejolak dan belum terdapat unsur keadilan di dalamnya.

Kondisi dalam perdamaian negatif telah memiliki tahap resolusi konflik, seperti *peacemaking* dan *peacekeeping*. Keduanya merupakan bagian dari menciptakan perdamaian negatif. Pertahanan negara dan regional dalam artian hadirnya tentara dan persenjataan yang kuat juga termasuk dalam bidang perdamaian negatif.

Perdamaian negatif sesungguhnya adalah suatu kondisi yang meminimalisir kekerasan. Bukan berarti kekerasan dalam suatu konflik telah hilang sepenuhnya. Akan tetapi, minimalisir merupakan pencegahan untuk menghindari kekerasan fisik. seperti pernyataan yang dikutip dari sebuah sumber yang menyebutkan *Total disarmament* (pelucutan senjata) mereduksi potensi perjuangan bersenjata di

¹³ Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta, Pranada Media Group, 2009, hal. 121.

masa mendatang.¹⁴ Pelucutan senjata merupakan upaya pencegahan konflik (resolusi konflik) sesaat setelah terjadinya *direct war* atau kekerasan langsung. Pelucutan senjata tidak selamanya bebas dari unsur kekerasan, di mana upaya ini melalui tindak kekerasan namun dengan tujuan untuk mengurangi kekerasan fisik yang sedang berlangsung. Proses yang mengikuti perdamaian negatif adalah negosiasi, arbitrase hingga pembicaraan di antara pihak-pihak yang bertikai.

Proses kedua dari tahap de-eskalasi, yaitu *agreement* yang merupakan perundingan bersama dengan pihak-pihak yang berkonflik untuk membicarakan masalah yang terjadi. Dalam proses inilah terlihat fungsi konflik yang dikemukakan oleh Coser yaitu sebagai sarana komunikasi dan pemersatu kelompok. Proses *agreement* seperti halnya upaya penciptaan perdamaian atau *peacemaking*. *Peacemaking* adalah upaya untuk menciptakan kesepakatan politik antarpihak yang bertikai, baik melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, maupun konsolidasi.¹⁵

Proses ketiga yaitu *normalization*, yaitu proses menjadikan konflik kembali normal. Proses ini seperti halnya dengan upaya pembangunan perdamaian atau *peacebuilding* yang merupakan salah satu resolusi konflik. *Peacebuilding* merupakan upaya rekonstruksi dan pembangunan sosial ekonomi pasca konflik untuk membangun perubahan sosial secara damai.¹⁶

Proses keempat atau terakhir dari tahap de-eskalasi konflik, yaitu *reconciliation*. *Reconciliation* memiliki arti perdamaian atau rukun kembali.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sandy Nur Ikfal Raharjo, "Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik Antar Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste pada 2012-2013", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 4, no.1, Maret, 2014, hal. 161.

¹⁶ *Ibid.*

Proses ini merupakan tahapan akhir dari konflik yang mengarah pada perdamaian positif (*positive peace*). Dalam tahap ini juga masih berlangsung perbaikan infrastruktur atau pembangunan sarana yang rusak akibat perang (*peacebuilding*). Perdamaian yang dicapai dengan rukun kembali membuat konflik yang dahulu memuncak kembali normal seperti tahap awal (eskalasi) dalam model analisa konflik ini, hal ini terlihat dalam bentuk kurva yang melengkung ke bawah.

Selain tahap perdamaian yang ditunjukkan dengan proses *reconciliation* dalam de-eskalasi konflik, kondisi dalam tahap ini juga sama halnya menuju ke arah perdamaian positif. Jika perdamaian negatif diidentikkan dengan gencatan senjata, maka lain halnya dengan perdamaian positif yang terdapat unsur keadilan (*justice*) di dalamnya.

Konsep perdamaian positif (*positive peace*) berdasarkan pada pemahaman dasar dari kondisi-kondisi sosial, cara menghapus kekerasan struktural melampaui tiadanya kekerasan langsung. Perdamaian ini memberikan dampak terhadap strategi perdamaian yang diaktifkan, yaitu dengan mengadakan usaha perubahan diskriminasi struktural. Tuntutan persamaan (*equality*) dalam mendapatkan sistem yang ada, baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial merupakan strategi tindakan dari perdamaian positif.¹⁷

Perdamaian positif menurut definisi pada paragraf sebelumnya menunjukkan suatu kondisi di mana hak-hak asasi dan kebutuhan ekonomi terpenuhi sebagai salah satu hal yang mendasar bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, dihapuskannya diskriminasi struktural menjadi hal utama yang harus terpenuhi dalam perdamaian positif.

¹⁷ Novri Susan, *op. cit.*, hal. 119-120.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam menganalisa konflik Afghanistan dan Pakistan, yaitu dengan menggunakan tipe Deskriptif-Analitik. Deskriptif-analitik merupakan tipe yang menggambarkan fenomena dengan bantuan data lalu ditarik kesimpulan. Tipe ini menggambarkan (deskriptif) urutan kejadian konflik di bagian awal, lalu berdasarkan data yang diperoleh penulis menganalisa (analitik) konflik yang terjadi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone* atau *email interview*).¹⁸ Untuk memperoleh data yang lebih lengkap, penulis menggunakan teknik *personal interview* dan *email interview*. *Personal interview* yaitu wawancara secara langsung adalah dengan menginterview beberapa responden atau informan untuk memperoleh informasi terkait dengan tujuan penelitian. Responden atau informan berupa praktisi maupun akademisi yang paham mengenai penyelesaian konflik di Afghanistan-Pakistan dan penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi.

¹⁸ Harbani Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi*, Makassar, 2005, hal. 99.

b. Studi Pustaka

Selain melalui wawancara, teknik untuk mengumpulkan data juga ditempuh dengan menelaah sejumlah literatur, yang terdiri dari buku, jurnal, dokumen, surat kabar harian, serta media elektronik. Dari hasil penelusuran bahan-bahan bacaan tersebut, penulis lalu memilah dan menyesuaikan dengan materi skripsi yang akan diteliti.

Adapun tempat penelitian yang penulis kunjungi untuk memperoleh data, yaitu :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin
- b. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas
- c. Perpustakaan HIMAHI FISIP Unhas

Langkah-langkah observasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati perkembangan penyelesaian konflik Afghanistan dan Pakistan melalui media cetak dan media *online*.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Sumbernya berasal dari responden atau informan. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari hasil penelusuran responden atau informan dengan menggunakan teknik penarikan sampel Bola Salju (*Snow Ball*).

b. Data Sekunder

Penelitian ini juga memerlukan penelaah yang diperoleh dari data-data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang bersumber dari literatur atau bahan bacaan, serta olahan dari berbagai sumber, seperti internet; buku; jurnal; dokumen; artikel; dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam metodologi penelitian sosial ada tiga, yaitu Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran (kuantitatif-kualitatif). Teknik Kuantitatif merupakan teknik analisis data dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk ditarik kesimpulan. Penelitian kuantitatif meliputi variabel-variabel dalam penelitian dan hubungan antar-variabel tersebut, para partisipan, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kuantitatif dimulai dengan mengidentifikasi variabel-variabel utama dalam penelitian beserta model visualnya, lalu mencari dan menentukan bagaimana variabel-variabel itu akan diukur atau diamati.¹⁹

Sedangkan teknik penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (*natural*) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah.²⁰ Penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui angka-angka maupun prosedur statistik melainkan memahami fenomena lalu mengeksplorasinya.

¹⁹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hal.175.

²⁰ Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2014, hal. 15.

Untuk meneliti tentang penyelesaian konflik Afghanistan-Pakistan, maka penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif. Teknik kualitatif mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Sehingga, penelitian ini dapat dianalisa lebih dalam setelah mengumpulkan berbagai data dan informasi secara mendetail. Selain itu, penulis juga menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu dengan menggambarkan masalah secara umum lalu ditarik kesimpulan secara khusus.

BAB III

KONFLIK AFGHANISTAN-PAKISTAN DAN PENYELESAIAN

KONFLIK MELALUI REKONSILIASI

A. Profil Negara Afghanistan

Afghanistan merupakan negara dengan nama resmi *Islamic Republik of Afghanistan*. Letak ibu kota berada di Kabul sekaligus kota terbesar. Luas wilayah Afghanistan yaitu 652.864 km² (251.827 sq miles)²¹ dengan populasi sebanyak 32.564.342 juta jiwa²² pada bulan Juli 2015. Bahasa yang paling banyak digunakan adalah Dari dan Pashto (Pushtun). Selain itu, agama Islam merupakan agama dengan penganut terbanyak di Afghanistan. Penganut Muslim Sunni adalah yang terbanyak, yaitu 80%, Muslim Shia 19%, dan agama lain 1%²³.

Gambar 1. Peta Wilayah Afghanistan



Sumber: *Maps of World*, (<http://www.mapsofworld.com/afghanistan/>)

²¹ BBC.com, *Afghanistan Country Profile*, 8 Oktober 2015

(<http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12011352>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 22:50 WITA.

²² Maps of World, (<http://www.mapsofworld.com/afghanistan/>), diakses Minggu, 29 November 2015, pukul 23:06 WITA.

²³ *Ibid.*

Afghanistan ditemukan dan dipersatukan oleh suku Pashtun pada tahun 1747. Negara ini menjadi negara penyangga (*buffer state*) antara pemerintah kolonial Inggris dan Kekaisaran Rusia hingga merdeka dari Inggris pada tahun 1919. Pemerintahan demokrasi berakhir pada tahun 1973 dengan kudeta dan sebuah pembalasan kudeta terhadap komunis pada tahun 1978. Uni Soviet kembali menginvasi Afghanistan pada tahun 1979 untuk mendukung rezim komunis Afghan, selain berupaya membantu untuk memperbaiki kerusakan akibat perang di Afghanistan. Uni Soviet menarik diri dari negara tersebut pada tahun 1989 di bawah tekanan internasional yang mendukung pemberontak mujahidin yang anti-komunis. Rangkaian peristiwa yang terjadi setelah itu adalah jatuhnya kota Kabul ke tangan Taliban pada tahun 1996. Taliban merupakan pergerakan yang didukung oleh Pakistan dan muncul pada tahun 1994 untuk mengakhiri perang saudara di Afghanistan. Pada tahun 2001, tepatnya tanggal 11 September terjadi serangan teroris yang menyebabkan USA beserta sekutunya dan *anti-Taliban Northern Alliance* menindak tegas Taliban sebagai tempat persembunyian dari Osama Bin Laden.²⁴

Konferensi Bonn yang berlangsung pada tahun 2001 menetapkan sebuah proses rekonstruksi politik yang mencakup penggunaan konstitusi baru dan disusul dengan pemilihan presiden pada tahun 2004. Hamid Karzai menjadi presiden pertama dan terpilih kembali pada tahun 2009. Pemerintah Afghanistan tentu menginginkan kestabilan politik sejak kemunculan Taliban yang menjadi tantangan bagi ketidakstabilan terhadap pemerintah Afghanistan. Pada tahun

²⁴ CIA.gov., World Factbook, (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html>), diakses pada Selasa, 22 Desember 2015, pukul 15:22 WITA.

2014, Afghanistan kembali melaksanakan pemilihan presiden yang mengangkat Ghani sebagai presiden dan Abdullah sebagai Chief Executive Officer. Sehari setelah perayaan pemilihan tersebut, pemerintahan Ghani menandatangani Perjanjian keamanan bilateral dengan Amerika Serikat dan NATO. Perjanjian itu menyediakan dasar hukum bagi kehadiran pasukan militer internasional di Afghanistan setelah tahun 2014.²⁵

1. Kondisi Geografis

Afghanistan merupakan sebuah negara *landlock* atau daratan yang terletak di Asia Selatan yang tidak memiliki lautan. Di sebelah tenggara Afghanistan berbatasan dengan Pakistan, sebelah barat berbatasan dengan Iran. Afghanistan berbatasan dengan Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan di sebelah utara. Di sebelah timur laut Afghanistan berbatasan dengan China.

Kondisi geografis Afghanistan bergunung-gunung, dengan ciri khas dari pegunungan Hindu Kush, Himalaya dan Pamir. Dataran tinggi ini terletak di barat daya. Selain itu ada juga dataran rendah yang terletak di bagian utara. Lokasi tertinggi Afghanistan terletak di Noshaq yang berkisar 7.492 meter (24,580 feet)²⁶ di atas permukaan laut di area pegunungan Hindu Kush yang berada di dekat negara China. Dataran rendah di sebelah utara terdapat lembah subur yang dialiri sungai. Adapun sungai-sungai utama di Afghanistan yaitu Kabul, Kunduz, Helmand, Arghandab dan Amu Darya.

Topografi Afghanistan didominasi oleh Pegunungan Hindu Kush yang membentang ke arah selatan dan barat dan Plato tandus di daerah barat daya

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Maps of World, *loc.cit.*

yang membentang hingga wilayah Pakistan dan perbukitan Lembah Indus. Daerah Hindu Kush merupakan daerah tandus yang membuat sebagian besar wilayah Afghanistan sulit dihuni dengan 50% luas daerahnya terletak di atas ketinggian 2.000 m atau 6.500 kaki. Hal itu tentu mempengaruhi iklim dengan rangkaian gunung yang berderet ke arah barat daya dari Hindu Kush hingga Pakistan dan menghalangi aliran udara lembab Samudera Hindia. Hal tersebut mengakibatkan seluruh daerah selatan Afghanistan beriklim kering.²⁷

Sumber daya alam yang terdapat di Afghanistan berupa gas alam, minyak bumi, batu bara, tembaga, khromit, tanah talk, barit, belerang, timah, bijih besi, garam, batu mulia dan tanah yang baik untuk ditanami.²⁸ Persentase lahan yang digunakan yaitu sebanyak 58,1% untuk area pertanian; hutan sebesar 2,1%; dan lainnya sebanyak 39,8%.

Afghanistan merupakan negara yang berbatasan dengan beberapa negara. Total panjang garis perbatasan Afghanistan yaitu 5529 km²⁹. Garis perbatasan terpanjang adalah dengan Pakistan, yaitu 2430 km. Perbatasan kedua negara ini memanjang dari bukit pegunungan Hindu Kush dan Pamir. Di sekitar bukit yang berada antara Pakistan dan Tajikistan, terdapat wilayah Afghanistan yang bernama *Wakhan Corridor*³⁰. Garis perbatasan Afghanistan dan Pakistan di buat oleh Sir Mortimer Durand, sekretaris luar negeri British India

²⁷ Andrew Heritage, David Robert & Roger Bullen, "Afghanistan & Pakistan", *Atlas Dunia: Referensi Terlengkap*, 2004, Penerbit Erlangga, hal. 154.

²⁸ CIA.gov., *World Factbook*, *loc.cit.*

²⁹ Maps of World, (<http://www.mapsofworld.com/afghanistan/afghanistan-border.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 23:23 WITA.

³⁰ *Ibid.*

pada tahun 1893. Garis ini kemudian disebut dengan *Durand Line* dan penggunaannya masih digunakan hingga saat ini.

2. Sejarah Afghanistan

Sejarah Afghanistan tidak terlepas dari pengaruh bangsa-bangsa Persia, Arab, Yunani, Khusans, Hephthalite, Turki, Mongol, Inggris, Uni Soviet hingga Amerika Serikat dan sekutunya. Afghanistan mulai dihuni oleh beberapa peradaban terkenal di kawasan itu sejak 50.000 tahun³¹ yang lalu. Mereka adalah Achaemenid, Macedonia, dan kerajaan Maurya.

Kerajaan Achaemenid mengambil alih wilayah Afghanistan pada abad ke-6 SM hingga wilayahnya ditaklukkan dan dikuasai oleh Alexander Agung pada 330 SM. Afghanistan berada di bawah kekuasaan Alexander Agung selama 330 SM hingga 323 SM setelah merebut wilayah ini dari Persia. Setelah 323 SM Afghanistan menjadi bagian dari Kerajaan Seleucid sebelum menjadi bagian dari Dinasti Maurya pada 305 SM.

Tahun 256 SM hingga 130 SM wilayah Afghanistan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Arsacids dan Parthian. Beberapa kerajaan sukses menguasai kawasan ini dengan menjadikan Afghanistan sebagai wilayah yang strategis. Selain dua kerajaan Arsacid dan Parthian, wilayah ini juga berhasil dikuasai oleh kerajaan Kushan, dan Sassanid. Setelah itu, banyak invasi yang bermunculan, seperti penaklukan oleh bangsa Arab dan Persia dari tahun 661 M hingga 750 M.

³¹ BBC.com, *loc. cit.*

Wilayah Afghanistan mulai dikenal sebagai negeri Khorasan pada abad ke-4 Masehi. Selama bangsa kedua bangsa Arab dan Persia berkuasa, Islam disebarluaskan di negeri ini dan menjadi pusat kebudayaan Islam di tahun 342 Masehi.

Akan tetapi, bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan menyerbu negeri itu di tahun 1219 yang menyebabkan banyak kerusakan. Antara abad ke-16 dan abad ke-18 tiga kerajaan mengatur wilayah ini, yaitu Bukhara, kerajaan Mughal, dan Safavid, yang segera mendominasi wilayah tersebut.

Pada tahun 1709 Mir Wais Hotak memimpin sebuah revolusi yang menentang pemerintah Persia, Safavid, dan mendeklarasikan kemerdekaan Afghanistan. Kerajaan Afghan dibentuk untuk mewujudkan stabilitas di kawasan itu dengan memerangi campur tangan Inggris dalam perang Anglo-Afghan di tahun 1840 hingga 1870. Inggris mengendalikan beberapa wilayah hingga Afghanistan dideklarasikan di bawah perjanjian Rawalpindi di tahun 1919, di mana Raja Amanullah Khan memperoleh tahta di tahun tersebut dan mencapai kemerdekaan Afghanistan.

Negara Afghanistan diperintah oleh serangkaian kerajaan hingga tahun 1973 ketika terjadi sebuah kudeta yang memberikan kesempatan pada Daud Khan untuk mengambil alih kekuasaan sebagai presiden. Setelah itu terjadi pula sebuah kudeta yang bernama Saur Revolution pada tahun 1978 yang menandai sejarah modern Afghanistan

Sejarah modern Afghanistan terdiri atas perebutan kekuasaan oleh para politikus yang dimulai pada tahun 1978.³² Pada tahun 1978, Partai Demokrat Afghanistan yang dikuasai oleh orang-orang dengan paham komunis mengambil alih kekuasaan negara tersebut yang menyebabkan pecahnya perang sipil.

Selama periode tersebut, Uni Soviet menandatangani perjanjian persahabatan dengan menguasai partai ekstrimis Afghanistan dan mendukung pemerintahan dengan cara terus menyuplai senjata. Sehingga, rezim pemerintahan Afghanistan berlangsung di bawah pengaruh Uni Soviet. Akan tetapi, hubungan Afghanistan dan Uni Soviet menjadi tegang. Pada Oktober 1979 Hafizullah Amin menolak nasehat dari Uni Soviet untuk berhati-hati terhadap kejatuhan pemerintahan. Sehingga, pada 24 Desember 1979 Uni Soviet menyerbu Afghanistan dan menggulingkan pemerintahan Hafizullah Amin.

Pada saat yang sama, Amerika Serikat mengintervensi wilayah perang dengan mendukung para mujahidin, yang terdiri dari orang Muslim yang menentang rezim komunis. Hal ini dilakukan sebagai strategi dalam perang dingin untuk membendung pengaruh komunis di wilayah tersebut, yang tidak lain adalah negara tetangga dari Pakistan. Amerika Serikat memberikan dukungan pada badan intelijen Pakistan (ISI) untuk membantu para mujahidin yang menentang kehadiran Uni Soviet di Afghanistan. Sehingga, Uni Soviet

³² Maps of World, (<http://www.mapsofworld.com/afghanistan/afghanistan-history.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 23:35 WITA.

tidak dapat mempertahankan kekuasaannya dalam menghadapi serangan para pemberontak, yang bermunculan sebagai teroris dan menginginkan kebebasan.

Strategi Amerika Serikat sukses setelah Uni Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan di tahun 1989 setelah berlangsungnya perang selama 10 tahun. Bahkan setelah tentara Uni Soviet tidak lagi berada di negara tersebut, Afghanistan menghadapi kekacauan dalam negeri dan menyaksikan kemunculan Taliban, yang menguasai Kabul di tahun 1996. Negara ini selalu sibuk dengan perang yang disebabkan oleh perbedaan faksi para Mujahidin. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyatukan faksi-faksi membuat Taliban muncul sebagai kekuatan yang memiliki pengaruh di bidang politik dan agama.

Pada bulan Oktober tahun, 2001 Amerika Serikat menyerang Afghanistan setelah tragedi 9/11. Amerika Serikat ingin memusnahkan teroris al-Qaeda yang jaringan operasionalnya berada di Afghanistan dan menyingkirkan pemerintah Taliban. Kemudian di tahun 2004 pemilihan presiden dilaksanakan pertama kali dalam sejarah politik Afghanistan.³³ Hamid Karzai terpilih sebagai presiden Republik Islam Afghanistan. Di tahun 2011, Karzai mengunjungi Russia sebagai bentuk kunjungan pertama pemimpin Afghanistan sejak berakhirnya invasi Uni Soviet di tahun 1989.

³³ *Ibid.*

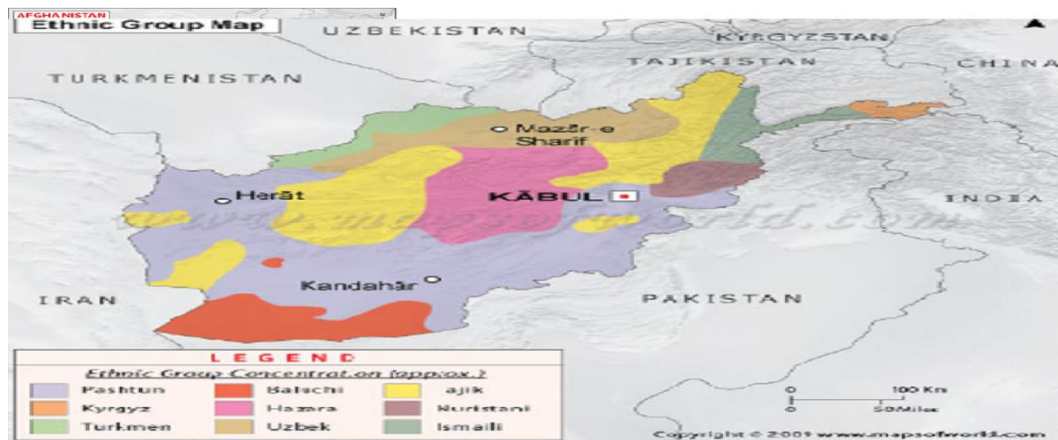
3. Kondisi Sosial dan Budaya

Konstitusi Afghanistan tahun 2004 mengakui 14 kelompok etnis yang terdiri dari Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, Balochi, Tukmen, Nuristani, Pamiri, Arab, Gujar, Brahui, Qizilbash, Aimaq dan Pashai. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari CIA *World Factbook* ³⁴ yang juga menguraikan persentase bahasa yang digunakan di Afghanistan. Bahasa Afghan Persian atau Dari merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, yaitu 50% dan merupakan bahasa resmi Afghanistan. Selain itu, bahasa Dari juga digunakan sebagai bahasa penghubung antar-suku di Afghanistan. Setelah itu, terdapat bahasa Pashto yang merupakan bahasa resmi kedua dengan penutur sebanyak 35%. Bahasa Turki dengan persentase 11 % yang digunakan oleh suku Uzbek dan Turkmen. Sebanyak 30 bahasa lain digunakan oleh suku Balochi dan Pashai dengan persentase 4 %. Sumber data yang sama juga menyebutkan bahwa pada Juli 2015 tercatat 32.564.342 jiwa populasi dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 2,32 %.

Afghanistan merupakan negara memiliki sejarah yang panjang dengan budaya yang beragam, di mana terdapat pengaruh dari bangsa Persia yang merupakan gabungan dari budaya lain. Meskipun demikian, banyak wilayah di Afghanistan yang kurang aman karena dikuasai oleh pemberontak. Saat ini proses pembangunan di Kabul masih berlangsung sebagai akibat dari pecahnya perang dan konflik yang berkepanjangan.

³⁴ CIA.gov, World Factbook, *loc.cit.*

Gambar 2. Peta Persebaran Kelompok Etnis Afghanistan



Sumber : *Maps of World*,
(<http://www.mapsofworld.com/afghanistan/afghanistan-ethnic-groups-map.html>)

Kondisi Afghanistan menjadi kurang stabil yang disebabkan oleh banyak konflik dan ketidakstabilan politik yang berlangsung lama.³⁵ Hal itu memperburuk kondisi ekonomi dan infrastruktur hingga berdampak pada munculnya banyak imigran yang berasal dari warga negara Afghanistan yang keluar untuk mencari wilayah yang aman dari konflik.

4. Sistem Politik

Nama Afghanistan berasal dari dua kata, yaitu ‘Afghan’ dan ‘stan’. Kata ‘Afghan’ merujuk pada suku Pashtun, di mana saat ini lebih menunjukkan seluruh kelompok etnis. Sedangkan akhiran ‘stan’ memiliki makna tempat atau negara. Afghanistan merupakan sebuah negara dengan beragam suku yang memperoleh kemerdekaan pada 19 Agustus 1919. Bentuk negara Afghanistan adalah republik dengan menganut sistem hukum campuran antara hukum sipil, adat dan hukum Islam.

³⁵ BBC.com, *loc. cit.*

Jenis pemerintahan di Afghanistan adalah *unitary presidential republic* yang dipimpin oleh presiden, wakil presiden dan perdana menteri. Sumber lain (CNN.gov) menyebutkan jenis pemerintahan Afghanistan adalah *Islamic republic*.³⁶ Presiden yang menjabat saat ini bernama Ashraf Gani dengan Sarwar Danish sebagai wakil presiden. Sedangkan Abdullah Abdullah menjabat sebagai perdana menteri, atau yang biasa disebut dengan kepala eksekutif.

Badan Eksekutif dalam sistem pemerintahan Afghanistan terdiri dari *chief of state, head of government* dan *cabinet*. *Chief of state* dipegang oleh seorang Presiden Republik Islam Afghanistan, Ashraf Ghani Ahmadzai yang menjabat sejak 29 September 2014. Selain sebagai *chief of government*, Presiden juga sebagai *head of government* bersama dengan CEO atau kepala eksekutif, Abdullah Abdullah yang terpilih sejak 29 September 2014; Wakil Presiden pertama, Abdul Rashid Dostam terpilih sejak 29 September 2014 dan Wakil Presiden kedua yang juga terpilih di waktu yang sama, Sarwar Danesh. Adapun *Cabinet*, terdiri dari 25 menteri yang ditunjuk oleh presiden yang diakui oleh *National Assembly*.

Pemilihan umum berlangsung dalam 5 tahun sekali dengan presiden yang dipilih langsung oleh suara atau voting terbanyak selama dua putaran. Pemilihan umum dua putaran yang terakhir berlangsung pada 5 April dan 14 Juni 2014 dan akan diselenggarakan selanjutnya pada tahun 2019. Adapun hasil pemilihan umum 2014 di ronde pertama yaitu: Abdullah Abdullah

³⁶ CIA.gov., World Factbook, *loc.cit.*

(*National Coalition of Afghanistan*) 45%; Ashraf Ghani (*Independent*) 31,6%; Zalmi Rassoul 11,4% dan lainnya 12%. Sedangkan di ronde kedua persentase voting dimenangkan oleh Ashraf Ghani sebanyak 56,4% dan Abdullah Abdullah 43,6% .

Badan Legislatif menganut sistem dua kamar atau *bicameral National Assembly* yang terdiri dari Meshrano Jirga atau *House of Elders* dan diisi oleh 102 kursi; 34 anggota yang dipilih secara tidak langsung oleh *district councils* dengan masa 3 tahun pemerintahan; 34 anggota yang dipilih secara tidak langsung oleh *provincial councils* dengan masa jabatan 4 tahun; 34 anggota yang diangkat oleh presiden yang diisi oleh 17 anggota wanita, 2 anggota yang mewakili kaum *disable* dan 2 perwakilan dari Kuchi nomad³⁷ dengan masa jabatan 5 tahun.

Adapun Wolesi Jirga atau *House of People* yang diisi dengan tidak lebih dari 250 kursi; anggota dipilih langsung dalam *multi-seat constituencies* oleh voting perwakilan yang proporsional dengan masa jabatan 5 tahun. Pemilihan umum untuk anggota legislatif, terakhir dilaksanakan pada 18 September 2010 yang akan diselenggarakan kembali pada tahun 2015.

Partai-partai yang ada di Afghanistan dipengaruhi oleh etnis yang membuat etnis merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi aliansi politik. Persentase partai politik dan posisi untuk duduk dalam pemerintahan berdasarkan kelompok etnis, yaitu Pashtun sebanyak 39%; Hazara 24%; Tajik

³⁷ Kuchi nomad merupakan suku pengembara yang ada di Afghanistan.

21%; Uzbek 6%; lain-lain 10% (termasuk Aimak, Arab, Baloch, Nuristani, Turkmen).

Selain itu, Konstitusi mengizinkan pemerintah untuk mengadakan sebuah sidang Loya Jirga (*Grand Council*) terhadap isu-isu kemerdekaan, kedaulatan nasional dan integritas wilayah. Hal tersebut dapat mengembangkan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi dan menuntut presiden secara hukum. Anggotanya terdiri dari Majelis Nasional (*National Assembly*) dan ketua provinsi dan dewan daerah (*district councils*). Akan tetapi, Loya Jirga dengan model tersebut belum pernah diselenggarakan dan *district councils* belum pernah dipilih.

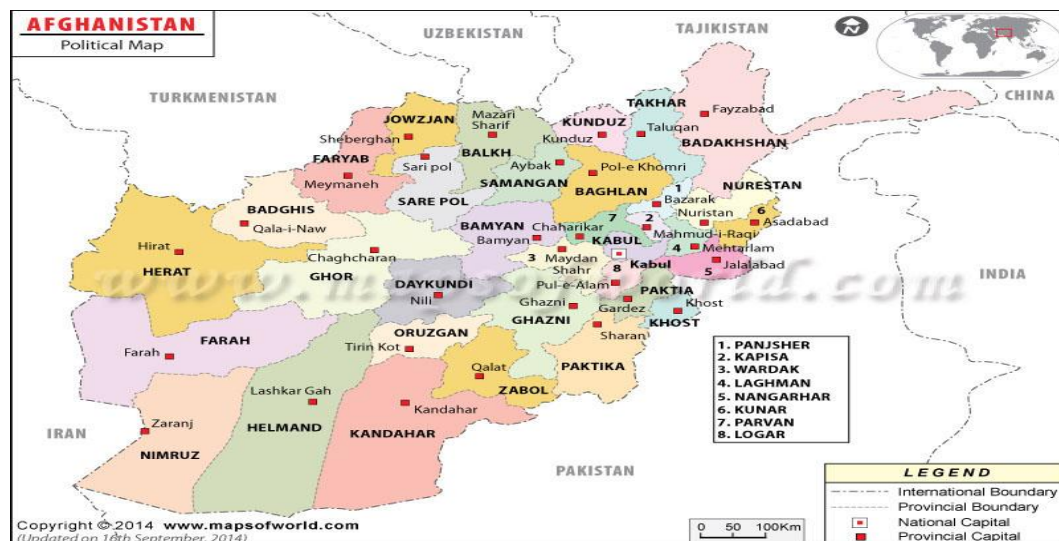
Badan Yudikatif terdiri dari *highest court, judge selection and term of office* dan *subordinate court*. *Highest court* diisi oleh Stera Mahkamah atau *supreme court* yang terdiri atas *supreme court chief* dan 8 lembaga peradilan yang menangani kasus kriminal; keamanan umum; perdata dan divisi perdagangan. *Judge selection and term of office* diisi oleh *court chief and justice* yang dipilih oleh presiden dengan persetujuan dari Wolesi Jirga dengan masa jabatan selama 10 tahun. Adapun *subordinate court* terdiri dari *Appeals Courts; Primary Courts; Special Courts* untuk isu-isu narkoba, keamanan, hak milik, keluarga dan anak.

Menteri peradilan (*Ministry of Justice*) mengesahkan sebanyak 84 partai politik yang ada sejak Desember 2012. Sementara itu, kelompok penekan juga terdapat dalam sistem politik Afghanistan. Kelompok penekan terdiri dari kelompok agama; kepala-kepala suku; kelompok etnis dan Taliban. Adapun

partisipasi Afghanistan dalam organisasi internasional adalah dengan menjadi anggota dalam FAO; G-77; IAEA; IBRD; ICC (NGOs); IDB; ILO; IMF; Interpol; SAARC; UN; UNCTAD; UNESCO; UNHCR; WHO.

Secara administratif, Afghanistan memiliki 34 provinsi (data dalam CIA.gov) yang masing-masing dipimpin oleh gubernur provinsi. Mereka ditunjuk oleh presiden nasional Afghanistan. Berikut peta politik Afghanistan yang menunjukkan letak dari provinsi-provinsi tersebut.

Gambar 3. Peta Politik Afghanistan



Sumber: *Maps of World*,
(<http://www.mapsofworld.com/afghanistan/afghanistan-political-map.html>)

Afghanistan memiliki 34 provinsi, namun tabel di halaman selanjutnya hanya menunjukkan 29 provinsi dengan tidak mencantumkan 5 provinsi lainnya, yaitu Daykundi; Khost; Nuristan; Panjshir dan Sar-e Pul. Jumlah populasi terbanyak, 1.373.572 jiwa menempati provinsi Kabul sekaligus merupakan ibu kota negara Afghanistan. Namun hal itu tidak sebanding dengan luas wilayahnya yang hanya 4,585 km². hal tersebut menunjukkan bahwa Kabul merupakan kota atau wilayah

terpadat dan tersibuk di Afghanistan. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak selanjutnya adalah Herat dengan 769.111 jiwa dan Ghazni sebanyak 646.623 jiwa. Adapun provinsi Helmand dengan ibu kota Lashgar Gah merupakan yang terluas, 61.829 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 517.645 jiwa.

Tabel I. Daftar Provinsi Di Afghanistan

Provinsi	Ibu Kota	Luas	Populasi
Badakhshan	Feyzabad	47,403	497,758
Badghis	Qal'eh-ye Now	21,858	233,613
Baghlan	Baghlan	17,109	533,782
Balkh	Mazar-e Sharif	12,593	580,146
Bamian	Bamian	17,414	268,517
Farah	Farah	47,788	234,621
Faryab	Meymaneh	22,279	582,705
Ghazni	Ghazni	23,378	646,623
Ghowr	Chaghcharan	38,666	337,492
Helmand	Lashgar Gah	61,829	517,645
Herat	Heart	61,315	769,111
Jowzjan	Sheberghan	25,553	588,609
Kabul	Kabul	4,585	1,373,572
Kandahar	Kandahar	47,676	567,204
Kapisa	Mahmud-e-Eraqi	1,871	250,553
Konar	Asadabad	10,479	250,122
Konduz	Konduz	7,827	555,437
Laghman	Mehtar Lam	7,210	310,650
Lowgar	Baraki Barak	4,652	216,241
Nangarhar	Jalalabad	7,616	745,986
Nimruz	Zaranj	41,356	103,634
Oruzgan	Tarin Kowt	29,295	444,168
Paktia	Gardez	9,581	482,158
Paktika	Orgun	19,336	245,229
Parvan	Charikar	9,399	504,750
Samangan	Aybak	15,465	261,693
Takhar	Taloqan	12,376	519,752
Vardak	Kowt-e-Ashrow	9,023	285,557
Zabol	Qalat	17,293	179,362

Sumber: Central Statistics Office website, Maps of World

5. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar wilayah Afghanistan merupakan daerah gurun dengan tanah lapang yang kosong, terdiri dari padang pasir yang berbatu-batu dan tanah yang kering. Jumlah panen yang dihasilkan dari kegiatan bercocok tanam sulit untuk ditentukan karena waktu yang tidak menentu dan berubah-ubah. Kemungkinan besar hasilnya berjumlah kurang dari 10%³⁸ dari seluruh tanah di wilayah Afghanistan. Kurang dari setengah tanah yang dapat ditanami memberi hasil panen dalam setahun. Adapun ladang-ladang dibiarkan kering atau tidak ditanami selama satu atau dua tahun di antara musim panen. Sedikitnya 50% hasil panen membutuhkan irigasi, yang dialirkan dari sumber mata air atau sungai atau bahkan dari saluran bawah tanah.

Kondisi perekonomian Afghanistan telah pulih dari konflik yang terjadi dalam waktu sepuluh tahun terakhir. Perekonomian Afghanistan meningkat secara signifikan sejak kejatuhan rezim Taliban pada tahun 2001 yang sebagian besar disebabkan oleh suntikan bantuan internasional; pemulihan sektor pertanian dan pertumbuhan sektor jasa. Meskipun demikian, Afghanistan bergantung pada utang luar negeri dan termasuk dalam kategori negara miskin. Utang luar negeri Afghanistan pada tahun 2013 mencapai 6,443 miliar US dollar dan meningkat di tahun 2014 sebanyak 6,681 miliar US dollar.³⁹ Selain itu beberapa faktor lain, seperti kriminalitas; ketidakamanan; pemerintahan yang lemah; kurangnya infrastruktur dan kesulitan pemerintah

³⁸ *Encyclopedia International*, Canada: Grolier Incorporated, Manufactured in United States by American Book-Stratford Press, Inc., New York, N.Y. 1970, hal.106

³⁹ CIA.gov., World Factbook, *loc.cit.*

untuk memperpanjang peraturan perundang-undangan di semua bidang merupakan tantangan dalam pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Menurut CIA.gov, tingkat standar hidup Afghanistan sangat rendah dengan berbagai permasalahan seperti kurangnya air bersih; kesehatan; listrik dan pekerjaan. Komunitas internasional, dalam konferensi yang melibatkan delapan negara donor, menjanjikan bantuan sebesar 67 miliar US dollar untuk pembangunan di Afghanistan dari tahun 2003 hingga 2010. Pada bulan Juli tahun 2012, pemberi bantuan dalam Konferensi Tokyo berjanji menambahkan bantuan sebesar 16 miliar US dollar untuk meningkatkan taraf hidup penduduk sipil yang di dalamnya termasuk rendahnya pendapatan masyarakat; kurangnya lapangan pekerjaan yang ada; angka korupsi yang tinggi; kapasitas pemerintahan yang lemah dan kurangnya prasarana umum.

Sumber yang sama juga menyebutkan GDP Afghanistan dari tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 GDP Afghanistan 57,77 miliar US dollar, tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan menjadi 60,04 dan 60,81 miliar US dollar. Adapun sektor penggerak dalam menunjang peningkatan GDP, yaitu sektor pertanian 23,9%; sektor industri 21% dan sektor jasa 55%. Sektor pertanian menghasilkan opium; gandum; buah-buahan; bulu domba; daging dan kulit domba. Adapun sektor industri menghasilkan batu bata dari hasil produksi skala kecil; tekstil; mebel; sabun; sepatu; pupuk; pakaian; produksi makanan; minuman non-alkohol; air mineral; semen; karpet tenun; gas alam; batu bara dan tembaga.

B. Profil Negara Pakistan

Pakistan memiliki nama resmi Republik Islam Pakistan dengan bentuk negara republik federal parlementer. Luas negara Pakistan adalah 796, 095 km² (307,374 *square miles*)⁴⁰. Pemerintahan pusat berada di kota Islamabad yang sekaligus merupakan ibu kota negara. Pakistan dihuni oleh penduduk yang mayoritas beragama Islam dengan persentase 97% , sedangkan 3% lainnya menganut agama Kristen dan Hindu. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, sebagai bahasa resmi dan Urdu sebagai bahasa nasional. Bahasa Inggris merupakan bahasa resmi dan dituturkan oleh kalangan elit dan sebagian besar menteri di Pakistan.

Gambar 4. Peta Wilayah Pakistan



Sumber: *Maps of World*, (<http://www.mapsofworld.com/pakistan/>)

⁴⁰ Maps of World, *Pakistan Political Map*, (<http://www.mapsofworld.com/pakistan/pakistan-political-map.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 23:21 WITA.

Negara Muslim Pakistan terbentuk dari pemisahan orang-orang Muslim di India pada tahun 1947 dan telah menghadapi pergolakan politik domestik dan konfrontasi regional. Negara ini dibentuk untuk mempertemukan tuntutan Muslim India untuk memiliki tanah air sendiri. Awalnya Pakistan terdiri dari dua wilayah, yaitu bagian timur yang terletak di wilayah Teluk Benggala dan berbatasan dengan India dan China. Wilayah timur tersebut kemudian dikenal dengan nama Bangladesh. Sedangkan bagian barat, wilayahnya membentang dari pegunungan Himalaya hingga ke Laut Arab yang kemudian dikenal dengan nama Pakistan. Akan tetapi, pada tahun 1971 kedua wilayah bagian ini terpisah ketika bagian timur (Bengali) memisahkan diri dengan bantuan dari India.⁴¹

1. Kondisi Geografis

Pakistan terletak di selatan benua Asia dan berbatasan langsung dengan Laut Arab di sebelah selatan. Di sebelah timur Pakistan berbatasan dengan India, Afghanistan dan Iran di sebelah barat serta China di sebelah utara.⁴² Adapun letak geografis Pakistan yaitu berada pada 23°37' Utara dan 61°76' Timur.⁴³

Bentang alam wilayah Pakistan didominasi oleh pegunungan dan gurun pasir. Wilayahnya terbagi ke dalam tiga bagian⁴⁴, yaitu pegunungan di sebelah utara, dataran rendah Indus dan dataran tinggi Balochistan. Pakistan

⁴¹ BBC.com, *Pakistan Country Profile*, 11 Oktober 2015.
(<http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12965779>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 23:36 WITA.

⁴² CIA.gov., *World Factbook*,
(<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html>), diakses pada Selasa, 22 Desember 2015, pukul 15:22 WITA.

⁴³ Maps of World, *Pakistan Geography*, (<http://www.mapsofworld.com/pakistan/geography.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 11:17 WITA.

⁴⁴ Maps of World, (<http://www.mapsofworld.com/pakistan/>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 11:12 WITA.

berbatasan langsung dengan beberapa negara, seperti India, China, Afghanistan dan Iran.

Lembah Sungai Indus yang berada di Pakistan merupakan bagian dari dataran rendah Indus-Gangga. Lembah ini sangat luas dan dipenuhi endapan sedimen lebih dari 50 juta tahun. Ketebalan endapan dari sedimen tersebut diperkirakan mencapai lebih 5.000 m atau 16.400 kaki.⁴⁵

Sebagian besar wilayah Pakistan memiliki iklim gurun, akan tetapi ada juga iklim sedang di wilayah barat laut serta iklim dingin di bagian utara (daerah pegunungan). Bagian timur negara ini merupakan dataran rendah, di bagian utara dan barat laut terdapat pegunungan serta di bagian barat merupakan dataran tinggi. Pakistan sering dilanda gempa bumi dan banjir di daerah sepanjang sungai Indus.⁴⁶

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Pakistan berupa gas alam; minyak tanah; batu bara; bijih besi; tembaga; garam; batu gamping/kapur dan lahan yang baik untuk ditanami. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian sebesar 35,2%; hutan 2,1% dan lainnya 62,7%.⁴⁷

⁴⁵ Andrew Heritage, David Robert & Roger Bullen, *loc.cit.*

⁴⁶ *Pakistan*, (<http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/332/340324/profiles.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 22:40 WITA.

⁴⁷ CIA.gov., World Factbook, (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html>), *loc.cit.*

2. Sejarah Pakistan

Peradaban sungai Indus merupakan salah satu peradaban tertua di dunia yang ada sekitar 5000 tahun⁴⁸ yang lalu dan saat ini dikenal sebagai negara Pakistan. Kebudayaan peradaban ini melebur dengan bangsa Indo-Arya, yang merupakan bangsa pendatang. Wilayah peradaban ini mengalami invasi berkali-kali selama berabad-abad dari bangsa Persia, Gujarat, Afghan, Turks dan bangsa Arab yang membawa ajaran Islam. Setelah itu, wilayah ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Mughal pada abad ke-16 dan 17. Pada abad ke-18 Inggris datang untuk menguasai wilayah ini yang mengakibatkan terjadinya pemisahan antara *British India*, yang mendirikan negara Islam Pakistan di bagian barat dan timur dengan Hindu India pada tahun 1947.

Data yang diperoleh dari *Maps of World*⁴⁹ menjelaskan bahwa pada tahun 327 SM peradaban Vedic dan kerajaan Persia membuka jalan perdamaian antara bangsa Yunani yang masing-masing telah memperebutkan wilayah yang terletak di sebelah selatan benua Asia (saat ini, Pakistan dan Afghanistan). Kebangkitan Islam pada tahun 650 M memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah tersebut. Seorang jenderal dari Dinasti Umayyah mengusulkan untuk membentuk dinasti Muslim untuk memperkuat perkembangan kerajaan Muslim di wilayah tersebut. Tidak lama berselang pada tahun 1526 M, wilayah tersebut menjadi bagian dari kerajaan Mughal. Pada tahun 711 M. Kejatuhan kerajaan Mughal membuat wilayah bagian Mughal diinvasi oleh bangsa Afghan dan selanjutnya oleh bangsa Sikh.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Maps of World, (<http://www.mapsofworld.com/pakistan/>), *loc.cit.*

Setelah kejatuhan kerajaan Sikh, sebagian besar wilayah tersebut dikuasai oleh pemerintah Kolonial Inggris. Pemerintah Kolonial Inggris memisahkan dan membentuk kerajaan Pakistan dari wilayah bagian kerajaan Mughal. Pemisahan ini kemudian dikenal dengan nama *Durand Line*, yang menjadi batas di antara Pakistan dan Afghanistan. Pada tahun 1949⁵⁰, *The British House of Commons* secara resmi menetapkan Durand Line sebagai batas antara negara Pakistan dan Afghanistan.

Pada tahun 1947 Inggris meninggalkan wilayah Pakistan dan memberikan kemerdekaan pada 14 Agustus. Wilayah yang resmi tergabung ke dalam negara Pakistan, yaitu Sindh, Punjab Barat, Balochistan, *the North-West Frontier Province* (NWFP) dan Bengali Timur.

Pada tahun 1956 bentuk negara Pakistan menjadi republik parlementer, namun pemerintahan dengan cepat digantikan dengan kekuasaan militer yang disusul dengan sebuah kudeta oleh Jenderal Ayub Khan. Pemerintahan sipil di negara tersebut bertahan antara tahun 1927 hingga 1977. Jenderal Zia ul Haq mengambil alih menjadi pemerintahan militer. Akan tetapi, rezim tersebut berakhir hingga tahun 1988 yang membuat demokrasi di Pakistan menjadi stabil dan berpengaruh secara signifikan di Asia Selatan.

⁵⁰ Brad L. Brasseur, "Recognizing the Durand Line ", *paper*, New York, *The East West Institute*, 2011, hal. 07.

3. Kondisi Sosial dan Budaya

Populasi Pakistan dalam sumber CIA.gov mencapai 199,085,847 juta jiwa (Juli 2015) dengan rata-rata pertumbuhan 1,46%. Penduduknya tergolong ke dalam etnis Punjabi, Sindhi dan kelompok etnis lainnya. Agama yang paling banyak dianut adalah Islam, dengan persentase Sunni 77% dan Syiah 20%.⁵¹ Selain itu, sumber lain juga menyebutkan bahwa persentase agama Islam sebesar 96,4% dengan persentase Sunni 85-90% dan Syiah 10-15%.⁵²

Peradaban Lembah Sungai Indus di zaman Perunggu sangat maju dan tumbuh subur, di mana saat ini wilayah lembah tersebut bernama Pakistan. Budaya di wilayah lembah sungai Indus telah berasimilasi dengan bangsa Hindu, Persia, Yunani, Sikh dan Mughal.⁵³ Hal tersebut tentu membuat munculnya beberapa etnis di Pakistan saat ini.

Pakistan memiliki beberapa etnis, diantaranya adalah Punjabi dengan persentase 44,68%; Pashtun (Pathan) 15,42%; Sariaki 8,38%; Muhajirs 7,57%; Balochi 3,57% dan lainnya 6,28%. Begitu pula dengan bahasa yang dituturkan oleh penduduk Pakistan, yaitu bahasa Punjabi dengan persentase 48%; Sindhi 12%; Saraiki 10%; Pashto 8%; Urdu 8%; Balochi 3%; Hindko 2%; Brahui 1% dan Burushaski dan etnis lainnya 8%.⁵⁴

⁵¹ *Pakistan*, (<http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/332/340324/profiles.html>), *loc.cit.*

⁵² Maps of World, (<http://www.mapsofworld.com/pakistan/>), *loc.cit.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ CIA.gov., World Factbook, (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html>), *loc.cit.*

4. Sistem Politik

Bentuk negara Republik Islam Pakistan adalah republik federal parlementer dengan Presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh parlemen. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh *the Lower House of Parliament* (Majelis Nasional) dan biasanya merupakan ketua dari partai mayoritas atau partai koalisi. Anggota parlemen dipilih melalui voting yang bersifat umum. Selain itu, terdapat sebuah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Islam Pemerintah Pusat.⁵⁵

Sumber CIA.gov dalam *World Factbook*⁵⁶ menjelaskan mengenai keanggotaan hingga hak pilih dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di Pakistan. Badan Eksekutif dalam pemerintahan Pakistan terdiri atas tiga bagian, yaitu *chief of state; head of government* dan *cabinet*. *Chief of State* dipegang oleh seorang Presiden, Mamnoon Hussain yang menjabat sejak 9 September 2013. *Head of Government* dipegang oleh perdana menteri, Mohammad Nawaz Sharif yang menjabat sejak 5 Juni 2013. Adapun *Cabinet* ditunjuk oleh presiden berdasarkan saran dari perdana menteri.

Presiden dipilih secara tidak langsung oleh *Electoral College* atau badan pemilih presiden yang terdiri atas anggota Senat, Majelis Nasional dan Provinsi. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun, di mana pemilihan presiden terakhir dilaksanakan pada 9 September 2013. Sementara itu, perdana menteri Pakistan dipilih oleh Majelis Nasional (*National Assembly*).

⁵⁵ *Pakistan*, (<http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/332/340324/profiles.html>), *loc. cit.*

⁵⁶ CIA.gov., *World Factbook*
(<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html>), *loc. cit.*

Badan Legislatif menganut sistem dua kamar atau *bicameral parliament* yang disebut Majlis-e-Shoora yang terdiri dari Senat dan *National Assembly*. Porsi keanggotaan senat adalah 104 kursi dengan anggota yang dipilih secara tidak langsung oleh 4 provinsi dengan representasi yang seimbang melalui voting. Masa jabatan 6 tahun dengan pemilihan ulang (*renewable*) terhadap setengah dari anggota setiap 3 tahun. Sedangkan porsi keanggotaan *National Assembly* adalah 342 kursi dengan 272 anggota dipilih langsung dalam *single-seat constituencies* melalui voting. Selain itu, 70 anggota yang terdiri dari 60 kursi untuk wanita dan non-Muslim sebanyak 10 kursi yang dipilih secara langsung melalui voting. Anggota *National Assembly* memiliki masa jabatan 5 tahun. Adapun pemilihan senat terakhir dilaksanakan pada 5 Maret 2015 dan 11 Mei 2013 untuk pemilihan *National Assembly*.

Partai politik yang terdapat di Pakistan diantaranya adalah Awami National Party (ANP); Balochistan National Party-Mengal (BNP-M); Jamaat-i Islami (JI); Jamiat-i Ulema-i Islam Fazl-ur Rehman (JUI-F); Muttahida Qaumi Movement (MQM); Pakhtun khwa Milli Awami Party (PkMAP); Pakistan Muslim League-Functional (PML-F); Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N); Pakistan People's Party Parliamentarians (PPPP); Pakistan Tehrik-e Insaaf (PTI); Quami Watan Party (QWP). Persentase hasil voting untuk anggota Senat, yaitu PPPP 27 sebanyak kursi; PML-N 26; MQM 8; ANP 7; PTI 6; JUI-F 5; PML-F 1; lainnya 10. Sedangkan hasil voting pada Juni 2013 untuk *National Assembly*, yaitu PML-N 126 sebanyak kursi; PPPP 31; PTI 28; MQM 18; JUI-F 10; PML-F 5 dan lainnya sebanyak 22.

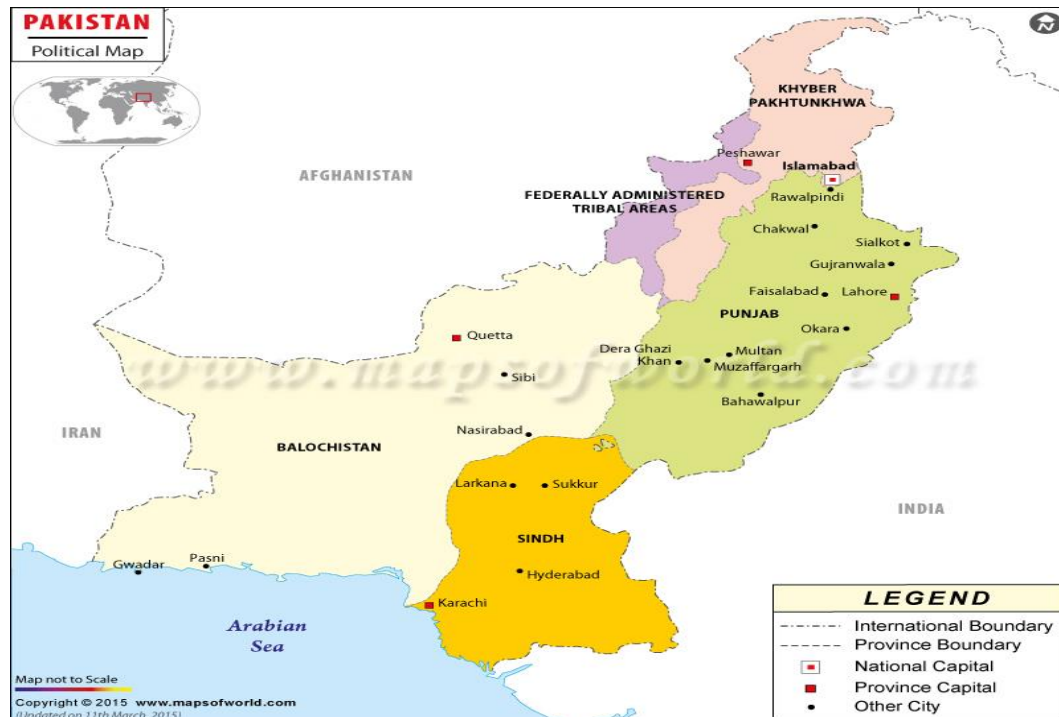
Selain beberapa partai politik yang ada di Pakistan, terdapat pula kelompok penekan. Kelompok penekan di Pakistan terdiri dari kalangan Militer; Ulama; Pemilik Tanah; Industriawan dan Pedagang Kecil.

Badan Yudikatif terdiri atas *highest court, judge selection and term of office* dan *subordinate courts*. *Highest Court* merupakan Pengadilan Tinggi yang terdiri dari kepala Mahkamah Agung dan 16 hakim. *Judge Selection and Term of Office* diangkat oleh presiden Pakistan. Keanggotaan bagian ini juga diangkat oleh 8 anggota parlemen selaku panitia dan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Yudisial. *Subordinate Courts* terdiri dari *High Courts; Federal Shariat Court; provincial and district civil and criminal courts; specialized courts* untuk isu-isu seperti perpajakan dan perbankan.

Patisipasi Pakistan dalam organisasi internasional adalah dengan terlibatnya dalam beberapa organisasi internasional, yaitu ADB; ARF; ASEAN (*dialogue partner*); FAO; G-11; G-24; G-77; IAEA; IBRD; ICC sebagai komite nasional; ILO; IMF; IDB; Interpol; IOM; OPCW; UN; UNCTAD; UNESCO; UNHCR; WHO; WIPO; WTO.

Secara administratif, wilayah Pakistan terbagi ke dalam 4 provinsi, 1 wilayah ibu kota dan 1 wilayah administratif kesukuan (*tribal areas*). Pada halaman selanjutnya terdapat peta politik yang menunjukkan pembagian wilayah administratif di Pakistan.

Gambar 5. Peta Politik Pakistan



Sumber: *Maps of World*,
(<http://www.mapsofworld.com/pakistan/pakistan-political-map.html>)

Tabel II pada halaman berikutnya menunjukkan pembagian wilayah di Pakistan. Islamabad merupakan ibu kota negara dengan kepadatan populasi yang lebih kecil dibandingkan dengan wilayah lainnya, yaitu 805,235. Hal tersebut sebanding dengan luas wilayahnya yang juga lebih kecil dari wilayah administratif lainnya dengan luas 906 km². Kota Lahore merupakan wilayah dengan penduduk terpadat di Pakistan dengan jumlah populasi 73,621,290 juta jiwa. Lahore terletak di provinsi Punjab dan merupakan kota yang paling dekat dengan perbatasan negara India. Wilayah administratif kesukuan atau *Federally Administered Tribal Areas* (FATA) juga terletak di kota Islamabad dan tidak termasuk ke dalam 4 provinsi.

Adapun provinsi di Pakistan terdiri atas Balochistan, dengan jumlah penduduk 6.565.885 jiwa, luas 347,190 km² dan ibu kotanya terletak di Quetta; Provinsi Punjab dengan luas 205,344 km², populasi 73,621,290 jiwa dan ibu kotanya terletak di Lahore; Provinsi Sindh dengan ibu kota Karachi seluas 140,914 km², jumlah penduduk 30,439,893 jiwa; Provinsi Khyber-Pakhtunkhwa atau yang biasa disebut dengan *the North-West Frontier Province* (NWFP) adalah provinsi yang terletak di sebelah barat laut Pakistan dengan luas 74,521 km², jumlah penduduk sebanyak 17,743,645 jiwa dengan ibu kota yang terletak di Peshawar.

Tabel II. Daftar Provinsi Dan Wilayah Bagian Di Pakistan

Wilayah	Polulasi	Luas(km. ²)	Area(mi. ²)	Ibu Kota
Balochistan	6,565,885	347,190	134,051	Quetta
Federally Administered Tribal Areas	3,176,331	27,220	10,510	Islamabad
Islamabad	805,235	906	350	Islamabad
Khyber-Pakhtunkhwa	17,743,645	74,521	28,773	Peshawar
Punjab	73,621,290	205,344	79,284	Lahore
Sindh	30,439,893	140,914	54,407	Karachi
6 Wilayah	132,352,279	796,096	307,374	

Sumber: *Maps of World*,
<http://www.mapsofworld.com/pakistan/pakistan-political-map.html>)

5. Kondisi Ekonomi

Permasalahan internal politik yang berlangsung selama beberapa dekade dan investasi asing yang berada dalam level rendah menjadi penyebab dari pembangunan dalam negeri Pakistan menjadi lambat dan terbelakang. Hasil pertanian dengan indeks 1-4 tidak sebanding dengan tenaga kerja dengan rentang 2-5. Hasil ekspor dari produksi tekstil membuat peningkatan pada pendapatan dalam negeri Pakistan. Akan tetapi, Pakistan tidak mampu membuat variasi terhadap produk ekspornya yang membuat pasar Pakistan kalah dalam permintaan pasar internasional. Indeks pembangunan manusia Pakistan rendah disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan kegiatan makro ekonomi.⁵⁷

Pemerintah Pakistan lalu menyetujui perjanjian dengan IMF pada tahun 2008 dalam menghadapi krisis. Pada bulan Desember 2014, IMF menggambarkan kemajuan Pakistan sebagai '*broadly on track*'. Pakistan masih tetap berada dalam kondisi *low-income* dan *low-growth trap* dengan pertumbuhan rata-rata 3,5% per tahun sejak 2008 hingga 2014.

Pakistan memiliki GDP 850 miliar US dollar di tahun 2013 dan 884,2 miliar US dolar di tahun 2014.⁵⁸ GDP tersebut meningkat di tahun 2015 menjadi 928,433 miliar US dollar.⁵⁹ Sektor yang berperan dalam menunjang perekonomian, yaitu pertanian dengan persentase 23,9%; industri 21% dan sektor jasa sebesar 55%. Sektor pertanian menghasilkan kapas; gandum; gula

⁵⁷ CIA.gov., World Factbook, (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html>), *loc.cit.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Maps of World, (<http://www.mapsofworld.com/pakistan/>), *loc.cit.*

tebu; buah-buahan; sayur-sayuran; susu; daging sapi; daging domba dan telur. Adapun produk dari sektor industri menghasilkan tekstil; makanan; obat-obatan; bahan bangunan; kertas; pupuk dan udang.

Menurut CIA.gov, cadangan emas dan pertukaran nilai mata uang asing Pakistan berjumlah 14,29 miliar US Dollar. Akan tetapi investasi asing melemah disebabkan oleh masalah keamanan stabilitas dalam negeri. Korupsi dan permasalahan birokrasi menjadi penyebab atas lambatnya pertumbuhan ekonomi Pakistan. Tenaga kerja mencapai 57,89 miliar dan sedang menghadapi masalah pengangguran sebanyak 5,7%.⁶⁰

Kondisi perekonomian Pakistan yang memburuk tampak pada kebijakan keuangan dan inflasi yang berlangsung terus-menerus. Hal ini terlihat dari lebih dari 1-3 orang dari seluruh populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kondisi infrastruktur dan melek huruf berada pada level yang rendah.⁶¹

C. Deskripsi Konflik

1. Konflik Internal Afghanistan

Wilayah yang saat ini bernama Afghanistan merupakan daerah perebutan dan persaingan antar-etnis dan suku. Pada abad ke-19 ketika *British East India Company* mulai memperluas kekuasaannya hingga ke barat laut wilayah jajahannya, yang saat ini bernama India. Ketika itu wilayah Afghanistan menjadi sebuah negara modern dengan terdapat kepentingan dua kekuatan besar, yaitu Inggris dan Kekaisaran Rusia. Kedua kubu memainkan geopolitik

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Pakistan, loc.cit.*

di negara tersebut yang dikenal dengan istilah *great game*⁶², atau pertentangan dua kekuatan yang sama-sama ingin menancapkan pengaruhnya di wilayah tersebut. Inggris menguasai wilayah anak benua India sedangkan kekaisaran Rusia menguasai daratan Asia Tengah hingga ke utara. Hal tersebut menyebabkan pengaruh keduanya menyentuh wilayah Afghanistan. Pada tahun 1893 terjadi perang Anglo-Afghan pertama dengan diinvasinya Afghanistan oleh Inggris karena takut terhadap ekspansi Rusia hingga Afghanistan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1919.

Pada tahun 1893, Sir Henry Mortimer Durand, sekretaris luar negeri pemerintah kolonial Inggris membuat garis di wilayah perbatasan antara British India dan Afghanistan. Garis wilayah itu dinamakan sebagai *Durand Line* setelah adanya negosiasi antara pemerintah Inggris dengan Raja Afghan, Abdur Rahman Khan, yang merupakan pendiri Afghanistan. Wilayah di sekitar garis perbatasan ini kemudian menjadi wilayah kesukuan (*tribal lands*) yang saat ini menjadi wilayah bagian dari Pakistan.

Barnett R. Rubin, seorang direktur pada *New York University's Center on International Cooperation* menulis tentang *Foreign Affairs*⁶³, mengemukakan bahwa Inggris menetapkan tiga perbatasan untuk memisahkan wilayah kekuasaannya dari Rusia. Perbatasan pertama memisahkan wilayah anak benua India yang di bawah pengawasan administrasi Inggris dengan wilayah di bawah kekuasaan Pashtun. Perbatasan kedua adalah *Durand Line*, yang

⁶²Jayshree Bajoria, 2009, *The Troubled Afghan-Pakistani Border*, Situs Council on Foreign Relations, (<http://www.cfr.org/pakistan/troubled-afghan-pakistani-border/p14905>), diakses pada Sabtu, 02 Januari 2016, pukul 15:14 WITA.

⁶³ *Ibid.*

membagi wilayah suku Pashtun dari wilayah teritorial di bawah pengawasan pemerintah Afghanistan. Perbatasan ini menjadi perbatasan internasional antara Pakistan dan Afghanistan hingga saat ini. Selanjutnya adalah perbatasan terluar, perbatasan Afghanistan dengan Rusia, Iran dan China.

Perang sipil yang terjadi di Afghanistan merupakan sebuah perang etnis menurut Bernt Glatzer⁶⁴. Seperti etnis Pustun melawan Tajik; Hazara dan Uzbek, di mana setiap etnis berperang secara terpisah di bawah setiap komandan dan dalam struktur militer yang mereka miliki. Konflik internal di Afghanistan disebabkan oleh beberapa etnis utama, seperti Pustun/Pashtun yang berjumlah 12 juta orang di Afghanistan. Sedangkan di Pakistan tercatat sebanyak 11 juta penduduk Pustun yang menggunakan bahasa Pakistan, dalam hal ini bahasa Urdu. Sistem kesukuan ini bersifat terbuka dan memiliki bahasa sendiri serta kode nilai etnis dan norma yang disebut 'Pustunwali'. Pustun menggunakan aturan-aturan tribal sebagai garis batas antara konflik dan solidaritas dengan ide bahwa seluruh anak-anak Pustun dilahirkan secara sama sebagai anak-anak dari satu nenek moyang. Perbedaan sosial dan ekonomi yang ada bukanlah anugerah alam atau sebagai sesuatu yang mesti diterima apa adanya.⁶⁵ Etnis Pustun terbagi ke dalam subdivisi yang berjumlah ribuan suku sesuai dengan ketentuan geneologis sebagai dasar solidaritas yang seringkali menjadi basis perpecahan dan konflik. Taliban telah mempolarisasi etnis tersebut dan menjadikannya dua kutub, yaitu etnis Pustun yang

⁶⁴ Bernt Glatzer, "Apakah Afghanistan di Jurang Disintegrasi Kabilah dan Etnis ?", dalam *Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan*, Editor: William Maley, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999, hal. 175.

⁶⁵ *Ibid.* hal. 181.

mendiami wilayah Selatan dan Timur serta di wilayah Utara dan pusat di mana Pustun sebagai kelompok minoritas.

Selain Pustun, etnis utama lainnya dalam konflik internal Afghanistan adalah Tajik, yang merupakan etnis terbesar kedua di Afghanistan. Dari provinsi yang berada di wilayah utara Kabul hingga ke Badakshan, kelompok ini menyebut diri mereka sebagai Tajik. Bahkan di setiap daerah kekuasaan Pustun, pasti terdapat kantong-kantong daerah yang dikuasi oleh Tajik. Tajik merupakan terminologi untuk menunjukkan bahwa mereka bukan masyarakat tribal.⁶⁶ Namun mereka adalah kaum Sunni dan berbicara menggunakan bahasa Persia.

Etnis penting selanjutnya adalah Hazara yang mayoritas adalah pemeluk Syiah Itsna Asyariah, seperti di Iran. Minoritas dari mereka adalah pemeluk Syiah Ismailiyah dan Sunni. Kelompok etnis ini berbicara dengan dialek Persia khusus atau 'Hazaragi' dan berdomisili di wilayah tengah Afghanistan. Selain itu, etnis ini juga berada di provinsi Quetta, Pakistan dan Mashhad di Iran. Adapun partai politik yang terbentuk antara lain Syuro-Ittifaq yang berasal dari jaringan kaum mulla ultra-konservatif; Nars dari konservatif moderat Islamis Modern Radikal; hingga partai yang beralian Maois.

Etnis penting selanjutnya adalah Uzbek, yang mendiami wilayah utara Afghanistan. Mereka adalah pemeluk Islam Sunni serta berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Turki. Selama perang Afghanistan-Soviet, beberapa dari mereka bergabung dengan pemerintahan pro-Soviet atau dengan pemerintahan

⁶⁶ *Ibid.* hal. 176.

baru yang mengambil kebijakan pro-minoritas. Saat ini mereka berada dalam komando militer Rasyid Dostum. Sebagiannya lagi bergabung dengan Muhajidin, bersama dengan Harakat Inqilab Islami yang kelompok pimpinannya kebanyakan dari Pustun.⁶⁷

Pada tahun 1992, rezim boneka Uni Soviet yang dipimpin oleh Najibullah ditumbangkan oleh kaum Mujahidin di bawah pimpinan Ahmad Syah Mas'ud. Revolusi politik memunculkan pengaruh yang besar oleh Mujahidin di bidang politik, namun pertarungan para pemimpin Mujahidin belum dapat membawa Afghanistan dalam kondisi damai.⁶⁸

Pada bulan Juni 1992 hingga September 1996 Afghanistan dipimpin oleh Presiden Burhanuddin Rabbani dari kelompok Jami'at Islami. Namun rezim Rabbani ditumbangkan oleh Taliban dengan beberapa faktor⁶⁹, yaitu lemahnya legitimasi politik; konflik internal partai; lemahnya tingkat penyelesaian elite serta adanya intervensi Pakistan yang sejak awal tidak percaya pada pemerintahan Rabbani. Hal itu terlihat dari perlakuan istimewa intelijen militer Pakistan (ISI) terhadap Gulbuddin Hikmatyar yang memimpin Hizb-e-Islami yang dianggap dapat memimpin pemerintahan Afghanistan pasca-komunis dan memungkinkan Islamabad untuk memperluas pengaruhnya.

Dua kekuatan besar dalam konflik politik di Afghanistan, yaitu Jami'at Islami yang dipimpin oleh Rabbani dan dibantu oleh Mas'ud. Faksi ini

⁶⁷ *Ibid*, hal. 178.

⁶⁸ Amin Saikal, "Pemerintahan Rabbani, 1992-1996, *Ibid*", dalam *Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan*, Editor: William Maley, , terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999, hal. 43.

⁶⁹ *Ibid*.

didominasi oleh etnis Tajik sebanyak 30% ⁷⁰ dari seluruh populasi Afghanistan. Mereka berpusat di Kabul, wilayah utara dan barat Afghanistan. Adapun Hizb-e-Islami, dipimpin oleh Hikmatyar terdiri dari 40-50% etnis Pustun dari populasi yang mendiami wilayah selatan dan tenggara Afghanistan.

Konflik kedua faksi tersebut bertujuan untuk mencapai kekuasaan selain disebabkan oleh konflik personal antar pemimpin dan perbedaan tradisional. Awalnya, Hizb-e-Islami kurang mendapat dukungan politis dibandingkan dengan Jami'at Islami. Pemerintahan yang terbentuk dipimpin oleh Mas'ud diambil alih oleh ambisi Hikmatyar untuk berkuasa dengan mulai melancarkan serangan roket ke Kabul pada tahun 1992. Hal itu bertujuan untuk memecah belah koalisi Jamiat dan menjadi sekutu Hikmatyar. Akan tetapi, usaha Hikmatyar untuk menguasai Kabul belum terwujud sehingga mendorong badan intelijen Pakistan mengalihkan dukungan pada kekuatan baru, yaitu milisi Taliban. Selain itu, gerakan Taliban juga dipersenjatai oleh etnis Pustun yang berada di wilayah perbatasan.

Kemunculan Taliban juga tidak terlepas dari kepentingannya yaitu mempunyai pasukan hebat dengan persenjataan lengkap untuk memenangkan pertarungan. Kelompok ini merupakan kalangan muda tradisional konservatif yang mampu mengubah kondisi internal di Afghanistan.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 44.

Menurut **Prof.Dr. M. Basir Syam, M.Ag.**, kondisi internal Afghanistan sebelum munculnya Taliban dan setelah kemunculan Taliban, yaitu;

Sebelum munculnya Taliban, pemimpin Afghanistan dipengauhi oleh blok Uni Soviet. Hingga masuknya pengaruh Amerika Serikat yang menyebabkan konflik antara pemerintah dengan blok Barat. Taliban awalnya merupakan sekelompok murid madrasah atau sekolah yang berkembang besar menjadi kelompok yang memiliki kepentingan akan ideologi di Afghanistan. Setelah munculnya Taliban, konflik bertambah karena tidak menginginkan pengaruh-Amerika Serikat maupun Uni Soviet di Afghanistan, khususnya di Asia Selatan. Pecah faksi di antara pemimpin politik Afghanistan. Hipotesa saya adalah terjadi perang pada siapa yang membantu mereka. Terdapat kepentingan negara-negara besar di belakang faksi-faksi ini.⁷¹

Selain kemunculan kekuatan baru yang menentang Jami'at Islamiah, krisis internal partai Jami'at Islamiah membuktikan lemahnya legitimasi politik pimpinan Rabbani. Sejak awal Jami'at berkembang dengan dua struktur, yaitu Sayap Politik dengan kontrol terbatas pada operasi militer dipimpin oleh Rabbani, dan Sayap Militer-Politik di bawah pimpinan Mas'ud.⁷² Namun setelah Mas'ud menguasai Kabul, dia dan Dewan Penasehatnya merasa lebih kuat dari pada Sayap Politik. Akibatnya, mereka memiliki keinginan untuk lebih berperan dalam pengambilan kebijakan Rabbani. Selain itu, munculnya kepentingan etnis dari setiap Jami'at menimbulkan perpecahan Dewan Penasehat dan partai. Ketidakpercayaan mulai muncul ketika Mas'ud terus memperoleh dukungan dari daerah Pansyir dan Rabbani yang terus menambah kekuatan dari orang-orang yang berasal dari daerahnya di Provinsi Badakhsan.

⁷¹ Wawancara dengan Prof.Dr. M. Basir Syam, M.Ag., dosen Ilmu Politik yang memahami sejarah Timur-Tengah, 30 November 2015.

⁷² Amin Saikal, *op.cit.*, hal. 48.

2. Konflik Afghanistan dan Pakistan

Sejarah panjang konflik antara Afghanistan dan Pakistan telah ada sejak zaman kolonialisme Inggris berkuasa di wilayah anak benua India. Kedua negara menjadi tempat persaingan politik dan kepentingan dari Inggris dan Uni Soviet.

Menurut **Prof.Dr. M. Basir Syam, M.Ag.**,

Pada abad ke-18, saat itu umat Islam berkuasa dari Spanyol, Timur Tengah, hingga kerajaan Mughal. Pengaruh mereka sangat besar. Namun setelah mengalami kemunduran, bangsa Barat bangkit. Terjadilah kolonialisme hingga konflik kepentingan di Eropa Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet dan Eropa Barat yang dikuasai Inggris. Selain itu, Barat juga ingin menguasai SDA dan menanamkan ideologi, khususnya di Asia Selatan. Inggris, yang menjadi penguasa pada saat itu ingin menyamai Alexander Agung yang memiliki kerajaan terluas di dunia saat Imperium Romawi berkuasa. Akar masalahnya adalah Inggris tidak ingin pengaruh Uni Soviet berkembang di wilayah kekuasaannya. Sementara itu, umat Islam juga punya kepentingan untuk mendirikan sebuah negara Islam. Lalu Inggris menawarkan untuk membentuk negara baru. Maka, berdirilah negara Pakistan untuk membendung pengaruh Uni Soviet.⁷³

Afghanistan dan Pakistan memiliki perbatasan yang sama dengan nama *Durand Line*. Wilayah *Durand Line* membuat penduduk di sekitarnya dengan mudah untuk keluar-masuk di kedua negara. Di wilayah sisi *Durand Line* Pakistan terdapat provinsi Balochistan, *the North West Frontier Province* (NWFP) dan *Federally Administered Tribal Areas* (FATA). Di wilayah Afghanistan, garis perbatasan membentang dari provinsi Nuristan di timur laut hingga ke provinsi Nimruz di bagian barat daya.

⁷³ Wawancara dengan Prof.Dr. M. Basir Syam, M.Ag., dosen Ilmu Politik yang memahami sejarah Timur-Tengah, 30 November 2015.

Selain menggunakan garis perbatasan yang sama, Afghanistan dan Pakistan juga memiliki etnis yang sama, yaitu Pashtun. Populasi Afghanistan terdiri dari 40% suku Pashtun, sementara di Pakistan suku Pashtun mewakili 15 hingga 20 persen dari total populasi. Etnis Balochi juga mendiami wilayah perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Duta Besar Pakistan untuk Washington, Hussain Haqqani pada CFR.org tahun 2007⁷⁴ mengemukakan bahwa orang-orang yang berada di antara sisi *Durand Line* menganggap enteng perbatasan tersebut. Pashtun menganggap wilayah itu adalah milik mereka meskipun terdapat kewenangan dari masing-masing negara.

Pashtun digerakkan oleh Kabul untuk menyerang Pakistan. Kabul juga telah menjadi tempat bagi diterapkannya politik domestik Pashtun, yaitu program politik Iridentis dan menyebut mereka sebagai sebagai *greater Afghanistan*⁷⁵. Sementara itu, Islamabad telah berusaha untuk menggerakkan pengungsi Afghanistan yang berada di Pakistan untuk menyerang Kabul dengan mengirim mereka kembali ke Afghanistan yang penuh dengan tekanan politik dan ekonomi.

Pada saat yang sama, pengungsi Afghanistan di Pakistan maupun militan Afghanistan yang sedang bersembunyi tidak menetap secara terus-menerus di wilayah perbatasan. Akan tetapi, mereka berpindah tempat ke bagian lain di

⁷⁴ Jayshree Bajoria, *loc.cit.*

⁷⁵ Vanda Felbab-Brown, *Pakistan's Relations with Afghanistan and Implications for Regional Politics*, The National Bureau of Asian Research : NBR Special Report Forthcoming 2015, hal. 04, (http://www.nbr.org/publications/specialreport/pdf/free/SR_Felbab-Brown_May2015.pdf), diakses pada Rabu, 30 Desember, pukul 14:48 WITA.

Pakistan, seperti Karachi, yang mereka berikan pengaruh di bidang politik; ekonomi; militer; kriminal serta hubungan antar-etnis.

Sumber lain juga menjelaskan bahwa sejarah panjang kedua negara telah menimbulkan kebencian dan rasa saling tidak percaya satu sama lain. Pada tahun 1970-an, Afghanistan memberikan perlindungan kepada nasionalis Baloch sementara Pakistan melatih para mujahidin untuk mendukung Taliban Afghan pada tahun 1980-an.

Suku Pashtun Pakistan telah menjadi orang-orang pengganggu dan diisolasi dan diabaikan dari pemerintah Pakistan sejak kolonial Inggris berkuasa di wilayah tersebut. Bahkan hingga saat ini wilayah federal kesukuan atau *the Federally Administered Tribal Areas* (FATA) yang merupakan tempat bagi suku Pashtun menjadi tidak stabil disebabkan oleh penerapan model kolonial, dengan ditunjuknya wakil politik yang mengatur teritori dan suku Pashtun melalui *tribal maliks* atau suku yang paling tua. Sistem *Frontier Crime Regulation* menghukum seluruh pelanggaran hukum kesukuan dan perwakilan politik daerah yang kurang bertanggung jawab.

Di bawah pemerintahan presiden Asif Ali Zardari, Pakistan menghapus undang-undang *Frontier Crime Regulation* dan mengizinkan pembentukan serta kampanye partai politik di FATA. Akan tetapi, perubahan sistem membutuhkan penyamaan status FATA dengan Pakistan pusat yang belum dilaksanakan. Hal tersebut menyebabkan wilayah kesukuan secara terus-menerus menjadi wilayah terbelakang di bidang ekonomi dan sosial, lemahnya

sistem hukum dan HAM, ketidakstabilan politik serta menjadi tempat bagi kelompok teroris.⁷⁶

Hubungan Afghanistan-Pakistan sangat panjang dan kompleks dengan banyak hal yang sama, seperti agama (Islam), beberapa kelompok etnis (Pashtun dan Baloch) dan ribuan mil perbatasan di antara kedua negara. Di tahun 1980-an, Amerika Serikat dan negara lainnya menggunakan keuntungan dari perbatasan wilayah kedua negara tersebut dalam membiayai kelompok mujahidin yang dengan mudah dapat keluar-masuk di dua negara tersebut pada saat terjadi pemberontakan melawan kehadiran Uni Soviet di Afghanistan. Kelompok ini kemudian berubah satu sama lain saat perang sipil, selanjutnya membinasakan negara tersebut hingga kelompok ultra-konservatif Taliban muncul sebagai pihak yang menang di akhir tahun 1990-an. Tahun 2001, Taliban dengan cepat ditaklukkan oleh *US-led International Coalition* dan telah menghabiskan beberapa tahun terakhir dalam menyusun kembali kekuatan di wilayah perbatasan kedua negara.⁷⁷

Amerika Serikat memiliki pengaruh yang besar terhadap Afghanistan dan Pakistan. Hubungan dengan Pakistan merupakan sebuah masalah yang kompleks dibanding dengan Afghanistan. Hal itu disebabkan oleh kurang stabilnya hubungan dengan pemerintah dan masyarakat Pakistan. Amerika Serikat mempercayakan kepada Musharraf, Presiden Pakistan yang menjabat saat itu untuk mendukung agenda pasca 11 September, namun pemerintah

⁷⁶ *Ibid*, hal. 05.

⁷⁷ J. Alexander Their, *On The Issues: Afghanistan/Pakistan*, 04 Januari 2008, (<http://www.usip.org/publications/the-issues-afghanistanpakistan>), diakses pada Sabtu, 02 Januari 2016, pukul 15:36 WITA.

Pakistan gagal untuk mengantarkan hal-hal kritis dalam agenda Amerika Serikat. Hal-hal tersebut berupa memindahkan tempat berlindung para militan; penutupan sekolah-sekolah (madrasah) yang radikal dan mengembalikan demokrasi.

Selain kehadiran pihak eksternal seperti Amerika Serikat dalam konflik Afghanistan dan Pakistan, kehadiran India juga mewarnai rentetan konflik kedua negara. Sejak tahun 1947 ketika pemerintah kolonial Inggris mengakui kemerdekaan Pakistan dan India, empat kali perang berlangsung di kedua negara. Tiga perang diantaranya adalah status Kashmir dan *Line of Control* yang memisahkan wilayah Pakistan terhadap Kashmir dengan bagiannya di wilayah India. Adapun perang lainnya disebabkan oleh perubahan status dari *East Pakistan* yang menginginkan kemerdekaan menjadi negara berdaulat Bangladesh.

Pakistan terus-menerus menaruh rasa curiga pada India terhadap ambisinya di Afghanistan. Di awal tahun 1950-an, India menawarkan ke Afghanistan untuk menjadi penyeimbang terhadap Pakistan melalui bantuan ekonomi dan militer serta pertukaran budaya yang membuat banyak kalangan elit Afghanistan yang telah menempuh pendidikan di India dan menetap di negara tersebut. Selama tahun 1950-an, ketika Pakistan dan Amerika Serikat mendukung mujahidin Afghanistan, India kembali mendukung rezim presiden Mohammad Najibullah yang pro-Uni Soviet.

Sepanjang tahun 1990-an, ketika Pakistan mendukung Taliban Pashtun, India bersama Rusia; China dan Iran menyediakan bantuan kepada *Northern*

Alliance yang mewakili minoritas non-Pashtun. Sejak tahun 2001, India menjanjikan bantuan sebesar 2 miliar US dollar untuk rekonstruksi Afghanistan yang meliputi infrastruktur; rumah sakit; beberapa proyek besar seperti gedung parlemen Afghanistan yang baru. Sepanjang tahun 2000-an, presiden Hamid Karzai merangkul India dari gangguan besar, seperti perjanjian kerja sama nuklir US-India pada tahun 2005 yang tidak memasukkan Pakistan. Kemudian, konsulat India di Afghanistan dipercaya oleh Pakistan untuk memata-matai perlengkapan dan sumber bantuan dari gerakan separatis di Balochistan. Sementara itu bantuan India dalam pembuatan bendungan di provinsi Kunar, Afghanistan diartikan oleh Pakistan sebagai jalan untuk mengalihkan sumber air dari Pakistan. Islamabad juga mempertimbangkan bahwa pemerintahan Karzai telah dipengaruhi oleh Iran sehingga memiliki sikap ancaman terhadap kepentingan Pakistan.

Ketakutan tersebut membuat Pakistan menekan kelompok militan Afghan dan kelompok jihad lainnya yang menggunakan Pakistan sebagai tempat berlindung, seperti jaringan Taliban dan Haqqani. Kesediaan Pakistan untuk mendukung kelompok tersebut merupakan modal yang dimiliki pada saat genting dalam melindungi wilayah barat dari peraturan persahabatan India di Kabul tentang keamanan akses rute perdagangan ke wilayah Asia Tengah.

Sebelum terjadinya tragedi 9/11, kehadiran Uni Soviet di Afghanistan membuat Pakistan dan Amerika Serikat menyepakati kebijakan di wilayah perbatasan yang berupa: pemerintah Afghanistan membuka perbatasan untuk menjamin akses Pakistan ke wilayah Kabul dan Asia Tengah. Hal itu

merupakan strategi Washington yang tepat dengan melihat Pakistan sebagai tempat yang menguntungkan untuk mencegah hegemoni Uni Soviet di kawasan tersebut. Namun pasca 9/11, Amerika Serikat ingin menguasai perbatasan kedua negara secara penuh yang membuat kepentingan nasional Pakistan bertentangan dengan kebijakan luar negerinya. Pada saat militer Pakistan ingin melanjutkan dukungan untuk kelompok militan yang bertujuan melawan ancaman India terhadap klaim atas Kashmir, di satu sisi Pakistan menerima bantuan luar negeri dari Amerika Serikat. Hal ini menjadi penyebab munculnya Taliban, di mana Hassan Abbas, seorang peneliti di Harvard's Kennedy School of Government⁷⁸ juga menjelaskan bahwa orang-orang ekstrimis muncul di perbatasan Pakistan dan mereka lalu memberikan tempat perlindungan kepada kaum militan yang menyebabkan pemberontakan dan kekacauan di Afghanistan.

Setiap konflik di Afghanistan dan Pakistan memiliki tahap eskalasi dan de-eskalasi konflik yang terdiri dari beberapa proses. Mulai dari munculnya konflik laten, perang, hingga resolusi konflik atau proses perdamaian. Akan tetapi, sebelum menganalisa konflik Afghanistan-Pakistan, penulis menyajikan data *timeline* konflik yang terjadi dari tahun 2003 sejak tragedi 9/11. Sehingga keterlibatan aktor-aktor baru seperti NATO, Turki, Amerika-Serikat serta Taliban menjadi lebih jelas dalam konflik dan penyelesaian konflik.

⁷⁸ Jayshree Bajoria, *loc.cit.*

Tabel III di halaman 99 menunjukkan kronologi konflik yang terjadi dari tahun 2003 hingga 2015. Setiap konflik dapat terjadi sekali atau lebih pada tahun yang sama. Konflik kedua negara pada tahun 2004 menunjukkan proses *direct war* atau perang langsung yang terjadi antara pasukan Pakistan dan militan al-Qaeda. Hal ini termasuk ke dalam kategori proses *violence* dalam tahap eskalasi, yaitu konflik yang semakin memuncak hingga tahun 2007.

Pada tahun 2008 konflik mengalami penurunan yang menunjukkan tidak adanya serangan langsung, namun proses ini berada pada tahap eskalasi konflik yang berupa pertentangan laten di kedua pihak yang bertikai. Hal ini ditunjukkan dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh pemerintah Afghanistan kepada Pakistan untuk menyerang militan Taliban di Pakistan apabila Pemerintah Pakistan tidak mampu menyerang militan.

Pada Februari 2009 terjadi de-eskalasi konflik menuju proses *casefire*, yaitu mengurangi perang hingga Maret 2009 proses *normalization* mulai terlihat dengan munculnya bantuan Amerika Serikat (*peacebuilding*) yang berupa pengiriman tentara untuk membantu di bidang keamanan kedua negara. Akan tetapi pada April di tahun yang sama, konflik kembali pecah dan berada pada proses *polarization* hingga memuncak empat bulan setelahnya yang ditunjukkan dengan terbunuhnya pemimpin Taliban Pakistan oleh *drone* Amerika Serikat di wilayah perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Hal ini menunjukkan adanya penambahan aktor dalam konflik dengan kepentingan berbeda yaitu antara kelompok Taliban dan negara Afghanistan dan Pakistan.

Salah satu efek yang ditimbulkan oleh konflik kedua negara adalah timbulnya rasa curiga satu sama lain. Hal ini ditunjukkan pada awal tahun 2011 di mana pejabat Afghanistan menuduh dinas intelijen Pakistan membantu Taliban untuk mempunyai pengaruh di Afghanistan. Proses ini disebut sebagai *differences*, yang ditunjukkan oleh perbedaan posisi, kepentingan, dan kebutuhan dalam suatu kelompok. Kepentingan Afghanistan adalah untuk keamanan negaranya dengan posisi saat itu yang sedang terancam oleh serangan Taliban dan al-Qaeda. Kebutuhan kedua negara terhadap keamanan nasional wilayah masing-masing kadang membuat kubu-kubu yang bertentangan dan rasa ingin mencapai tujuan sendiri dan berusaha untuk menyingkirkan pihak yang satu. Hal inilah yang terjadi antara Afghanistan dan Pakistan, dua negara tetangga yang selalu dilanda rasa saling curiga.

Pada November 2011 terjadi penurunan kembali konflik dengan dimulainya *agreement* berupa pembicaraan perdamaian antara Afghanistan dan Pakistan dengan Turki sebagai pihak ketiga. Selama konflik berada di tahap de-eskalasi, masing-masing negara memperkuat keamanan nasionalnya dengan mengadakan kerjasama dengan negara lain dalam hal pertahanan, seperti Afghanistan dan India. Dalam tahap ini bukan berarti perang tidak ada sama sekali. Akan tetapi terdapat cara pencegahan perang yang sementara itu sedang diupayakan oleh kedua pihak.

Pada awal tahun 2012, situasi konflik sempat berada pada tahap de-eskalasi dengan *agreement* sebagai jalan pembicaraan damai antara Amerika

Serikat dan Afghanistan yang sebelumnya saling menyerang. Namun eskalasi konflik kembali terjadi di tahun yang sama dengan munculnya penyebab lain, seperti bom bunuh diri Taliban di Pakistan. Sehingga pada awal tahun 2013 pemerintah kedua negara sepakat membuat perjanjian yang menandakan konflik kembali mengalami penurunan atau de-eskalasi.

Akan tetapi, di tahun yang sama eskalasi konflik kembali terjadi dengan saling tuduh di antara pemerintah Pakistan dan Islam Taliban, hingga di awal tahun 2014 menghasilkan kesepakatan kedua pihak (Pakistan dan Taliban) untuk melakukan gencatan senjata. Pembicaraan damai di antara kedua pihak berulang kali dilanggar dengan munculnya kembali serangan-serangan Taliban baik di Afghanistan maupun di Pakistan. Awal tahun 2015 konflik kembali memuncak yang ditunjukkan oleh serangan Taliban di wilayah Pakistan. Namun pada bulan Mei di tahun yang sama perundingan kembali diadakan untuk menyepakati kepentingan masing-masing pihak hingga menyetujuinya agar konflik tidak terulang kembali. Hingga pada September 2015 proses *agreement* masih terus dilakukan dengan kerjasama pemerintah Pakistan dan Afghanistan dalam melihat dan memahami kepentingan Taliban.

Tabel III. Timeline Konflik Afghanistan-Pakistan

Tahun	Penjelasan	Proses
Agst.2003	NATO mengambil alih keamanan di Kabul	-
Juni 2004	Serangan pertama Pakistan terhadap militan al-Qaeda dan pendukungnya di perbatasan Afghanistan + serangan US dengan target pemimpin Al-Qaeda.	<i>Violence</i>
2007	Pakistan melancarkan serangan terhadap militan di sebelah utara Waziristan.	<i>Violence</i>
Juni 2008	Presiden Karzai akan mengirim pasukan ke Pakistan untuk menyerang militan jika Islamabad gagal menyerang mereka.	<i>contradiction</i>
Mar. 2009	Presiden US membuka strategi baru bagi Afghanistan dan Pakistan. 4.000 pasukan US akan melatih dan mendukung tentara dan polisi Afghanistan.	<i>normalization</i>
April 2009	Perjanjian Swat dilanggar setelah militan Taliban memperpanjang pengawasan di luar batas wilayah perjanjian. Pakistan melancarkan serangan.	<i>polarization</i>
Agst.2009	Pemimpin Taliban Pakistan terbunuh oleh serangan <i>drone</i> US di selatan Waziristan.	<i>violence</i>
Jan. 2011	Beberapa pejabat Afghanistan menuduh dinas intelijen Pakistan membantu Taliban dan jaringan Haqqani yang berhubungan dengan al-Qaeda, untuk mempunyai pengaruh di Afghanistan.	<i>differences</i>
Nov. 2011	Turki menjadi penengah dalam upaya penyelesaian konflik diplomatik antara Afghanistan dan Pakistan. Konferensi Regional di Istanbul.	<i>agreement</i>
2011	Afghanistan menjadi tuan rumah Konferensi Regional yang membahas kerjasama lintas batas di wilayah dan stabilitas kawasan.	<i>reconciliation</i>
Okt. 2011	Selama hubungan Afghanistan dan Pakistan memburuk karena rangkaian serangan, Afghanistan dan India menandatangani perjanjian untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang keamanan.	-
Des. 2011	Pakistan memboikot Konferensi Bonn di Afghanistan sebagai protes terhadap NATO yang menyerang di perbatasan.	<i>polarization</i>
Jan. 2012	Taliban setuju membuka kantor di Dubai sebagai pergerakan menuju pembicaraan damai antara US dan Afghanistan.	<i>agreement</i>
Juli 2012	Pakistan membuka ulang rute NATO ke Afghanistan setelah US meminta maaf atas penyerangan sebelumnya.	-
Okt. 2012	Penembak Taliban melukai aktivis Malala Yousafzai, 14 tahun. Hal itu menyulut kemarahan Pakistan.	<i>polarization</i>
Nov. 2012	Bom bunuh diri Taliban pada proses ibadah Muslim Syiah di Rawalpindi, Pakistan.	<i>polarization</i>
Feb. 2013	Presiden Zardari (Pakistan) dan Presiden Karzai (Afghanistan) sepakat untuk membuat perjanjian perdamaian Afghan.	<i>agreement</i>
Juni 2013	Presiden Karzai menunda pembicaraan dengan US setelah Washington mengumumkan rencananya untuk menahan pembicaraan langsung dengan Taliban.	<i>agreement</i>
Sept. 2013	Bom bunuh diri di sebuah gereja di Peshawar. Islam Taliban dituduh sebagai pelakunya.	<i>contradiction</i>
Mar. 2014	Pemerintah Pakistan dan perwakilan Taliban bertemu di utara Waziristan untuk bicara perdamaian. Gencatan senjata sebagai agenda utama.	<i>casefire</i>

Tahun	Penjelasan	Proses
Jan. 2015	Taliban menyerang mesjid Syiah di Sindh dan Peshawar	<i>polarization</i>
Mei 2015	Pemerintah Afghanistan dan perwakilan Taliban menyelenggarakan pembicaraan damai di Qatar.	<i>reconciliation</i>
Agst.2015	Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani kerap berusaha menjalin hubungan yang lebih erat dengan Pakistan, dengan harapan Pakistan membawa kelompok Taliban ke meja perundingan. ⁷⁹	<i>polarization</i>
Sept. 2015	Penasehat keamanan Pakistan, Sartaj Aziz, mengunjungi Afghanistan untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai antara kelompok Taliban dengan pemerintah Afghanistan. ⁸⁰	<i>agreement</i>

Sumber: Diolah dari data sekunder yang diperoleh dari BBC UK, *Afghanistan & Pakistan profile-Timeline*; VOA Indonesia; DW.com.

D. Penyelesaian Konflik yang Telah Dilakukan

Penyelesaian konflik di antara kedua negara pernah ditempuh melalui mediasi PBB. Pada fase pertama, yaitu ditandatanganinya Kesepakatan Jenewa pada bulan April 1988 di mana tim mediasi dipimpin oleh Diego Cordoves dengan peserta kesepakatan adalah Afghanistan dan Pakistan. Sedangkan Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani sebagai penjamin. Fase kedua terjadi setelah selesainya penarikan mundur seluruh pasukan Uni Soviet dari Afghanistan pada bulan Februari 1989 yang ditandai oleh pengunduran diri Cordovez dan berakhirnya mandat PBB pada UNGOMAP (*United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan*) pada 15 Maret 1990.⁸¹

⁷⁹ Berlianto, "Afghanistan Minta Pakistan Tindak Tegas Kelompok Taliban", *International Sindo News*, 10, Agustus, 2015, (<http://international.sindonews.com/read/1031504/40/afghanistan-minta-pakistan-tindak-tegas-kelompok-taliban-1439223506>), diakses pada Senin, 14 September 2015.

⁸⁰ Berlianto, "Penasehat Keamanan Pakistan Sambangi Afghanistan", *International Sindonews*, 04, September, 2015, (<http://international.sindonews.com/read/1040907/40/penasehat-keamanan-pakistan-sambangi-afghanistan-1441381178>), diakses pada Jumat, 04 September 2015.

⁸¹ William Maley, "PBB dan Afghanistan: Kerja Terbaik atau Gagalnya Satu Misi", dalam buku *Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan*, Editor: William Maley, 1999, terj. Samson Rahman, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hal. 192-193.

Tabel III menunjukkan bahwa upaya perdamaian Afghanistan dan Pakistan terlihat pada tahun 2011 ketika Turki menjadi negara penengah dalam upaya penyelesaian konflik diplomatik. Setelah itu, terdapat *joint statement* ketiga negara pada pertemuan 11-12 Desember 2012 di kota Ankara untuk melanjutkan konferensi trilateral ketujuh mereka. Hal yang ditekankan pada kerja sama tersebut adalah mengenali tantangan yang biasa terjadi, seperti teroris dan ekstrimis yang mengancam kestabilan dan perdamaian kedua negara dalam satu kawasan.

Tidak hanya itu, pada 27-28 Januari 2011 juga ada kesepakatan atau *joint statement*⁸² kedua negara di Islamabad. Afghanistan dan Pakistan juga bergabung dalam *joint statement* kerja sama empat negara bersama Iran dan Tajikistan pada 27 Maret 2014 dengan pertemuan yang berlangsung di Kabul.

Berdasarkan Tabel IV yang berada di halaman 108, pertemuan Afghanistan dan Pakistan berlangsung pada April 2013 di Brussel. Pertemuan trilateral kedua negara dengan Amerika Serikat berfokus pada hubungan antara Afghanistan dan Pakistan, proses perdamaian serta ketegangan antara Kabul dan Islamabad serta semua instabilitas di perbatasan dua negara. Kedua anggota parlemen kedua negara kembali bertemu pada tahun yang sama di Kabul dengan penandatanganan MoU yang fokus pada masalah keamanan, kerja sama pertahanan dan masalah teroris di wilayah perbatasan.⁸³ Dialog bilateral antara *Senate Standing Committee*

⁸² *Ministry of Foreign Affairs of Islamic Republic of Afghanistan*, 29, Januari, 2011, (<http://mfa.gov.af/en/news/2974>), diakses pada Kamis, 21 Januari 2016, pukul 17:18 WITA.

⁸³ *Afghan and Pakistani parliamentarians*, Pajhwok News, 14, September, 2013, (<http://www.pajhwok.com/en/photo/212567>), diakses pada Sabtu, 30 Januari 2016, pukul 07:36 WITA.

on Defence and Deterence Production of Pakistan dan Internal Security and Local Administration Committee of Meshrano Jirga of Afghan Parliament berlangsung pada 10-11 September.⁸⁴

Pertemuan kedua negara kembali dilaksanakan pada Februari 2014 di Kabul yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dalam *Joint Economic Commission*.⁸⁵ Kedua negara sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan meresmikan konstruksi pembangunan jalan Torkham-Jalalabad sepanjang 75 km.

Pada November 2014 Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani bertemu dengan Sartaj Aziz , *Adviser on National Security and Foreign Affairs* Pakistan di Rawalpindi. Ashraf Ghani menjamin kerja sama dengan Pakistan untuk memerangi terorisme. Selain itu, dalam kedua negara juga sepakat untuk mempromosikan kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi dan perdagangan demi mencapai kepentingan dan keuntungan bagi kedua negara. Dari pihak Pakistan, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Luar Negeri Aizaz Ahmed Chaudhry, Jenderal Angkatan Darat Raheel Sharif, Sekretaris Letnan Jenderal Pertahanan Alam Khattak dan Direktur Jenderal Pertahanan *Inter Services Intelligence* (ISI) Rizwan Akhtar dan pejabat senior militer lainnya. Sementara dari pihak Afghanistan, presiden ditemani oleh Menteri Pertahanan Bismillah Muhammadi, Kepala Staff Jenderal Afghan Sher Muhammad Karimi, serta para pejabat senior Keamanan Afghanistan.

⁸⁴ *Report of The Senate Committee on Defence and Defence Production: Visits to Afghanistan & Azerbaijan*. September-Oktober 2013. Report 7. Senate of Pakistan.

⁸⁵ *Pakistan, Afghanistan to enhance trade ties*, Dawn News, 24, Februari, 2014, (<http://www.dawn.com/news/1089063>), diakses pada Selasa, 05 Januari 2016, pukul 11:10 WITA.

Pada Mei 2015, kedua negara mengadakan pertemuan di Kabul yang diwakili oleh Ashraf Ghani (Afghanistan) dan Nawaz Sharif (Pakistan). Rekonsiliasi dengan Pakistan menjadi agenda utama Ghani sejak terpilihnya menjadi presiden. Hal ini dibuktikan oleh Afghanistan yang telah mengirimkan sekelompok tentara untuk belajar di Pakistan sebagai bentuk perlawanan dengan India yang terus memberikan pengaruhnya terhadap Afghanistan. Di sisi lain, Sharif akan bekerja lebih untuk memerangi terorisme. Selain itu, Sharif meyakinkan Presiden Ghani bahwa musuh Afghanistan tidak dapat menjadi teman bagi Pakistan.⁸⁶

Sumber yang diperoleh dari PILDAT Pakistan⁸⁷ juga menjelaskan bahwa Perdana Menteri Pakistan dan COAS (*Chief of Army Staff of Pakistan*) mengunjungi Kabul pada 12 Mei 2015 dan mengadakan pertemuan dengan presiden dan kepala badan Eksekutif Afghanistan. Setelah itu pada 18 Mei, *Inter Services Intelligence Agency Pakistan* (ISI) dan *Afghanistan's National Directorate of Security* (NDS) menandatangani MoU dalam hal operasi koordinasi melawan militan di wilayah perbatasan kedua negara.⁸⁸ Perjanjian tersebut

⁸⁶ *Afghanistan and Pakistan thaw relations with pledge to fight terrorism together*, The Guardian Mei, 2015, (<http://www.theguardian.com/world/2015/may/12/afghanistan-and-pakistan-thaw-relations-with-pledge-to-fight-terrorism-together>), diakses pada Selasa, 19 Januari 2016, pukul 11:00 WITA.

⁸⁷ *Monitor Civil-Military Relations in Pakistan*, Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency (PILDAT), Mei, 2015, hal. 06. (http://www.pildat.org/Publications/publication/CMR/MonitorOnCivil-MilitaryRelationsinPakistan_May012015_May312015.pdf), diakses pada Selasa, 19 Januari 2016, pukul 11:17 WITA.

⁸⁸ Syed Mudassir Ali Shah, *Security Deal*, Dawn News, 26, Mei, 2016, (<http://www.dawn.com/news/1184207>), diakses pada Selasa, 05 Januari 2016, pukul 11:24 WITA.

bertujuan untuk *sharing* intelijen, saling melengkapi dan berkoordinasi pada operasi intelijen di masing-masing pihak.⁸⁹

Selama bulan Mei 2015, Perdana Menteri dan COAS bertemu langsung selama enam kali, yaitu: 1) Pertemuan pertama berlangsung pada 11 Mei 2015 untuk mendiskusikan hubungan Pakistan-Afghanistan di segala bidang sebelum mengunjungi Kabul; 2) Keduanya mengunjungi Kabul pada 12 Mei 2015 untuk bertemu dengan pemimpin Afghanistan; 3) Pertemuan ketiga pada 18 Mei 2015, ketika COAS dipanggil oleh Perdana Menteri; 4) COAS dipanggil lagi pada 25 Mei 2015 untuk mendiskusikan keamanan internal dan eksternal negara; 5) Keduanya kembali bertemu pada 27 Mei 2015 untuk mendiskusikan kemajuan dari *National Action Plan* dan mengukur efektivitasnya; 6) Keduanya mengunjungi markas besar ISI pada 29 Mei 2015 dan berdiskusi dengan Letnan Jenderal Rizwan Akhtar mengenai situasi keamanan internal dan eksternal internal negara.⁹⁰

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pajhwok News,⁹¹ pemerintah Afghanistan menetapkan beberapa ketentuan dalam perjanjian ISI dan NDS serta penguatan penandatanganan MoU tersebut. Pertama, perjanjian tersebut adalah program pelatihan bersama. Kedua, aktivitas beberapa kelompok yang

⁸⁹ Mohammad Taqi, *Pak-Afghan relations: war is peace?* Daily Times, 21, Mei, 2015, (<http://www.dailytimes.com.pk/opinion/21-May-2015/pak-afghan-relations-war-is-peace>), diakses pada Selasa, 19 Januari 2016, pukul 10:34 WITA.

⁹⁰ *Monitor Civil-Military Relations in Pakistan*, *op. cit.*, hal. 07-08.

⁹¹ Ahmad Shah Erfanya, *NDS-ISI Deal Being Reviewed CEO Office*, Pajhwok News, 24, Mei, 2015, (<http://www.pajhwok.com/en/2015/05/24/nds-isi-deal-being-reviewed-ceo-office>), Kamis, 21 Januari 2016, pukul 17:45 WITA.

memperjuangkan kemerdekaan di wilayah Durand Line Pakistan. Ketiga, jaringan intelijen musuh yang terdapat di kedua negara.

Pada bulan Mei 2015 presiden Ashraf Ghani menyambut baik kunjungan *Chairman Nishat Group*, Mian Mohammad Mansha. Bagi Afghanistan, investasi awal oleh Nishat Group diharapkan dapat memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara di bidang energi; perbankan; tekstil; semen. Bagi Nishat Group, kesempatan berinvestasi di Afghanistan merupakan pilihan yang ideal untuk bekerja sama dalam memelihara perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Pengembangan investasi dan perdagangan antara Afghanistan dan Pakistan sangat penting untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.⁹²

Pertemuan Presiden Ashraf Ghani dengan Duta China untuk Afghanistan dan Pakistan pada 10 November 2015, membahas kerja sama anti terorisme dan membantu mewujudkan stabilitas dan perdamaian serta pembangunan ekonomi di Afghanistan. Menurut Ghani, perdamaian di Afghanistan memiliki dua ukuran, pertama adalah damai dengan Pakistan dan kedua adalah damai dengan Taliban.⁹³ Sementara itu, masih dalam bulan yang sama Penasehat Keamanan Perdana Menteri Pakistan dalam sebuah pertemuan dengan wakil PBB di Afghanistan⁹⁴

⁹² *Afghan president welcomes investment by Nishat Group*, Pakistan Today, 15, Mei, 2015, (<http://www.pakistantoday.com.pk/2015/05/15/business/afghan-president-welcomes-investment-by-nishat-group/>), Kamis, 21 Januari 2016, pukul 17:33 WITA.

⁹³ *President Ghani Meets Chinese Special Envoy On Afghanistan*, Pakistan, Bakhtar News Agency, 10, November, 2015, (<http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/19776-president-ghani-meets-chinese-special-envoy-on-afghanistan-pakistan.html>), diakses pada Kamis, 03 Desember 2015, pukul 12:27 WITA.

⁹⁴ *Sartaj Aziz The Advisor of The Prime Minister of Pakistan Once Again Talks About Peace In Afghanistan*, Bakhtar News Agency, 18, November, 2015, (<http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/19908-sartaj-aziz-the-advisor-of-the-prime-minister-of-pakistan-once-again-talks-about-peace-in-afghanistan.html>), diakses pada Kamis, 03 Desember 2015, pukul 12:00 WITA.

mengatakan bahwa komunitas internasional menginginkan pembicaraan damai Afghanistan segera dimulai dan Pakistan mendukung hal tersebut.

Para pemimpin politik Khyber-Pakhtonkhwa dan Quetta dari Pakistan berkunjung ke Kabul untuk bertemu dengan *Chief Executive of Afghanistan*, Dr. Abdullah Abdullah pada Desember 2015⁹⁵. Kunjungan tersebut bukan hanya menemui tokoh politik Afghanistan, namun juga anggota organisasi masyarakat Afghanistan. Mereka menyatakan keinginan untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian di antara kedua negara dan untuk kawasan regional. Pembicaraan tersebut berupaya untuk memperkuat hubungan antara Afghanistan dan Pakistan yang mempertimbangkan gerakan radikal ekstrimis yang dapat mengancam kepentingan kedua negara. Selain itu, kepala badan Eksekutif Afghanistan berharap agar tercapainya perdamaian yang permanen sehingga pembangunan ekonomi dapat berlangsung sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan perdamaian.

Tokoh politik dari Khyber-Pakhtonkhwa dan Quetta yang hadir, yaitu Aftab Ahmad Khan Shirpao, Mahmud Khan Achakzai dan Asfandiyar Wali Khan. Presiden Ashraf Ghani mengatakan kepada mereka bahwa Afghanistan merupakan rumah mereka juga. Selain itu, mereka juga dapat berkunjung kapan pun untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas di kedua negara. Sementara itu, Shirpao juga mengatakan bahwa Afghanistan adalah negara yang merdeka dengan

⁹⁵ *CE Meets Khyber-Pakhtonkhwa Quetta Political Leaders*, Bakhtar News Agency, 30, November, 2015, (<http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/20066-ce-meets-khyber-pakhtonkhwa-quetta-political-leaders.html>), diakses pada Kamis, 02 Desember 2015, pukul 11:39 WITA.

harapan agar terciptanya perdamaian di Afghanistan selain menyampaikan pesan perdamaian dari rakyat Pakistan.⁹⁶

Pertemuan Afghanistan dan Pakistan yang berlangsung di Paris dalam rangka konferensi perubahan iklim pada Desember 2015 menghasilkan persetujuan kedua negara untuk bekerja sama. Pertemuan tersebut berlanjut menjadi pertemuan trilateral dengan bergabungnya Perdana Menteri Inggris, David Cameron untuk mendukung proses rekonsiliasi di Afghanistan dan mendukung kerja sama kedua negara.

⁹⁶ *President Ghani Meets U.S. Congressmen, Khyber Pakhtunkhwa Politicians*, Bakhtar News Agency, 28, November, 2015, (<http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/20017-president-ghani-meets-us-congressmen-khyber-pakhtunkhwa-politicians.html>), diakses pada Kamis 03 Desember 2015, pukul 11:48 WITA.

Tabel IV. Pertemuan Afghanistan dan Pakistan

Waktu	Agenda	Tokoh	Tempat
April 2013	Hubungan Afghanistan dan Pakistan	Afghanistan-Pakistan-Amerika Serikat	Brussel
Sept.2013	Saling bertukar MoU	Anggota Parlemen	Kabul
Feb.2014	Pertemuan Afghanistan-Pakistan untuk meningkatkan perdagangan bilateral (<i>Joint Economic Commission</i>)	Menteri Keuangan Pakistan, Ishaq Dar dan Dr Hazrat Omar Zhakailwal (Afghanistan)	Kabul
Nov. 2014⁹⁷	Afghanistan menjamin kerja sama anti-terorisme dengan Pakistan	Sartaj Aziz , <i>Adviser on National Security and Foreign Affairs</i> (Pakistan) dan Presiden Ashraf Ghani (Afghanistan)	Rawalpindi (Pakistan)
	Bekerja sama untuk memerangi teroris	Ashraf Ghani (Afghanistan) dan Nawaz Sharif (Pakistan)	Kabul
12 Mei 2015	Mengevaluasi hasil pembicaraan terkait kerja sama dalam bidang ekonomi dan investasi	<i>Chairman Nishat Group</i> Mian Mohammad Mansha dan Presiden Ashraf Ghani	Kabul
29 Nov. 2015	Memperkuat hubungan persahabatan kedua negara	<i>Chief Executive</i> Afghanistan Dr. Abdullah Abdullah dan pemimpin Khyber-Pakhtonkhwa dan Quetta	Kabul
Des. 2015⁹⁸	Pembicaraan perdamaian	Presiden Mohammad Ashraf Ghani (Afghanistan) dan Perdana Menteri Mohammad Nawaz Sharif (Pakistan)	Paris

Sumber: Diolah dari data sekunder yang diperoleh dari *Dawn News*; *Bakhtar News Agency*; *Pajhwok News*; *Pakistan Today*; *Daily Times*; *The Guardian*.

⁹⁷ Matin Haider, *Afghan president assures Pakistan of anti-terror cooperation*, Dawn News, 14, November, 2014, (<http://www.dawn.com/news/1144446>), diakses pada Selasa, 05 Januari 2016, pukul 11:27 WITA.

⁹⁸ *President Ghani, PM Sharif Agree To Revive Stalled Peace Talks With Taliban*, Bakhtar News Agency , 02, Desember, 2015, (<http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/20108-president-ghani-pm-sharif-agree-to-revive-stalled-peace-talks-with-taliban.html>), diakses pada Kamis, 03 Desember 2015, pukul 11:22 WITA.

E. Penyelesaian Konflik melalui Rekonsiliasi di Beberapa Negara

1. Peran *National Reconciliation Commission* (NRC) dalam

menyelesaikan konflik gerakan separatis Pattani di Thailand

Pattani merupakan kerajaan Islam berdaulat yang memiliki kekayaan alam seperti emas, timah, laka, kapur barus, perahu dan eboni. Kerajaan merdeka yang mempunyai struktur politik, sosial, budaya dan ekonomi sendiri sesuai dengan kultur melayu dan landasan agama Islam. Selain bangsa-bangsa barat yang berambisi untuk mendapatkan pengaruh dari Pattani, kerajaan Thai (Siam) memandang Pattani sebagai area yang harus terhimpun dalam kerajaan Thai sebagai sebuah teritori politik.⁹⁹

Aktor kunci dalam konflik gerakan separatis Pattani terbagi berdasarkan ideologi¹⁰⁰, yaitu *National Front of Pattani* (NLFP); Barisan Revolusi Nasional (BRN) dengan orientasi public, namun cenderung ke arah sosialisme Islam, mempunyai tujuan revolusi sosial dan membebaskan daerah Pattani Raya melalui jalan kekerasan; *Pattani United Liberation Organization* (PULO), kelompok gerilya. Adapun faktor penyebab konflik, yaitu terancamnya budaya etnik Melayu-Muslim; kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Thai; Sekularisasi pokok dengan di berlakukannya konsep pendidikan sekuler; Mempertahankan identitas kultur yang dianggap keramat, yaitu fundamentalisme Islam; Mendapat dukungan internasional NLFP yang berpusat di Mekah-Arab Saudi; Keinginan untukmendapatkan

⁹⁹ Megawati. "Gerakan Separatis Pattani sebagai Faktor Konflik dan Pengaruhnya Terhadap Aspek Keamanan di Thailand", Skripsi, Makassar, Program Reguler Sore Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, hal. 37.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 49-50.

otonomi dalam keagamaan, kebudayaan serta hukum; adanya dominasi elit politik etnis Thai terhadap etnis melayu muslim di pemerintahan lokal dan nasional; disparitas ekonomi antara pusat dan provinsi di pinggiran.¹⁰¹

Komisi Rekonsiliasi Nasional (NRC) dibentuk oleh pemerintah Thailand untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sekitar satu abad. Beberapa rekomendasi hasil kerja komisi yang dapat memberi dampak positif bagi perdamaian di wilayah Selatan. Diantaranya yaitu, otonomi khusus dan pemberian kebebasan lebih atas penggunaan bahasa Melayu di wilayah publik; diperbolehkan penggunaan bahasa Melayu di lembaga pendidikan pemerintah dan perkantoran; peristiwa penghilangan warga dan penembakan baik dilakukan oleh warga maupun tentara kepada warga diusut tuntas dan transparan. Rekomendasi ini telah disampaikan lebih dari satu tahun, namun pemerintah belum melaksanakan butir-butir rekomendasi secara menyeluruh.

Pada tahun 2006, hampir seluruh faksi yang memberontak menandatangani perjanjian rekonsiliasi *Joint Peace and Development Plan for South Thailand* (Perdamaian Bersama dan Rencana Pembangunan Thailand Selatan) oleh PULO, BRN-C, Gerakan Mujahidin Islam Pattani dan Barisan Pembebasan Islam Pattani.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 52-54.

¹⁰² *Ibid*, hal. 80-81.

2. Langkah Rekonsiliasi pemberontak Tamil di Sri Lanka

Masyarakat Tamil mencapai sekitar 18% dari penduduk Sri Lanka yang berjumlah 19,2 juta orang. Mereka berada di provinsi-provinsi utara dan timur yang dikuasai oleh pemberontak. Mayoritas penduduk Sri Lanka adalah warga Sinhala. Sekitar 15.000 pemberontak Tamil memerangi pemerintah Sri Lanka dalam konflik etnik dengan tujuan untuk mendirikan sebuah negara Tamil merdeka. Pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak LTTE atau Macan Pembebasan Tamil Eelam yang meningkat sejak pemerintah secara resmi menarik diri dari gencatan senjata enam tahun pada Januari 2008.

Pemerintah Sri Lanka pada 18 Mei 2009 mengumumkan berakhirnya konflik puluhan tahun dengan Macan Tamil setelah pasukan menumpas sisa-sisa kekuatan pemberontak tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga mendesak Sri Lanka agar melakukan banyak hal bagi rekonsiliasi pasca perang dan demokrasi, salah satunya adalah memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi pada tahap-tahap akhir perang.¹⁰³ Untuk mewujudkan rekonsiliasi tersebut, Pemerintah Sri Lanka yang baru akan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk meneliti kekerasan dalam konflik dengan kelompok separatis.¹⁰⁴

¹⁰³ *AS Desak Rekonsiliasi Sri Lanka*, ANTARA News, (<http://www.antaranews.com/print/212783/as-desak-rekonsiliasi-sri-lanka>), diakses pada Minggu, 24 januari 2016, pukul 22:49 WITA.

3. *Amnesty* di Afrika Selatan

Sejak hadirnya demokrasi pada tahun 1994, Afrika Selatan telah mengatur negaranya agar tidak terjadi konflik internal dalam skala yang lebih besar. Hal ini merupakan hasil dari pendekatan pembangunan-bangsa (*nation-building*) yang muncul selama proses negosiasi di tahun 1990 hingga 1994. Hasil tersebut terdiri dari kompromi, konsensus dan rekonsiliasi.

Di Afrika Selatan, konflik kekuasaan akan terus ada hingga dan tidak akan berhenti pada rezim apartheid saja. *Amnesty*, sebagai bagian dari proses rekonsiliasi difasilitasi oleh *Truth and Reconciliation Commission* (TRC). Proses TRC dimulai pada Desember 1995 dan berakhir dalam pelaksanaannya pada Oktober 1998 ketika komisi memegang laporan sebanyak 3.500 halaman. TRC memiliki fungsi untuk menjamin pengampunan, membuktikan kebenaran dari kasus korban hingga membuat laporan akhir sejak terjadinya kekerasan politik antara tahun 1960 dan pelantikan Nelson Mandela pada Mei 1995. Sebanyak 20.000 orang datang dan mengaku menjadi korban di bawah rezim apartheid. Lebih dari 7.000 orang mengajukan pengampunan, hampir 800 orang menerima pengampunan atas tindakan kriminal seperti pembunuhan dan penyiksaan.¹⁰⁵

Proses pemberian *amnesty* tersebut juga tidak lepas dari dukungan ANC (*African National Congress*) yang menjelaskan bahwa *amnesty* merupakan hal mutlak untuk menciptakan stabilitas dan kerja sama menuju proses

¹⁰⁵ Brandon Hamber, "Transformation and Reconciliation" dalam *Contemporary Peacemaking*, Editor: John Darby dan Roger Mac Ginty, London, Palgrave Macmillan, 2003, hal. 226.

perdamaian. ANC juga telah melaksanakan program-program pembangunan sosial, seperti pada Agustus 1998 sebanyak 1.4 juta rumah dialiri listrik dan tersambung ke jaringan listrik nasional dan 3.5 juta orang menerima pasokan air pada Maret 1999.¹⁰⁶

4. Penyelesaian Konflik di Poso

Setelah Indonesia memasuki masa Reformasi, wilayah Poso, Sulawesi Tengah berada dalam konflik suku dan agama. Pada 25 Desember 1998 yang merupakan hari Natal bagi umat Kristen dan bertepatan dengan bulan Ramadhan bagi umat Islam. Pada waktu itu di daerah Sayo, terjadi sebuah pertikaian kecil oleh pemuda nasrani kepada seorang muslim. Setelah itu, konflik meluas dengan bermacam-macam isu menyebar hingga menimbulkan bentrok fisik yang awalnya hanya merupakan konflik anak muda dan konflik sosial politik lokal.

Para tokoh agama menyadari bahaya konflik jika tidak segera ditangani. Ketua MUI Poso, K.H.Abd.Salam Thahir dan Tokoh Masyarakat Islam, Yahya Mangun bergabung dengan para pendeta untuk membicarakan konflik yang terjadi. Melalui mediasi para tokoh, pejabat pemerintah dan wakil rakyat setempat mencapai kesepakatan untuk tidak saling menyerang.

Namun konflik kembali terjadi pada 16 April 2000 dengan pertikaian sekelompok pemuda di Terminal Poso. Pada 24 Mei 2000 kerusuhan terjadi dengan munculnya aktor baru. Pada 19 Juli 2001 aktor eksternal, Laskar Jihad Ahlus Sunnah Waljamaah dari Jakarta hadir di Posos untuk memberikan

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 228.

bantuan sosial, pelayanan kesehatan, advokasi dan pembelaan bagi umat Islam. Sedangkan umat Kristen makin memperkuat diri, konsolidasi hingga mencari bantuan eksternal.

Berdasarkan catatan JK yang berjudul *Konflik Poso*¹⁰⁷, dalam perilaku konflik semua sudah berada di luar batas-batas ajaran agama. Semua pihak merasa mereka hanya mempertahankan diri dari serangan. Karena itu, masing-masing pihak meminta bantuan, baik dari dalam maupun luar negeri. Rekonsiliasi telah dilakukan berulang kali, namun sulit untuk menghentikan serangan para gerilyawan yang terus terjadi. Sehingga, masyarakat Poso hanya memiliki tiga pilihan, yaitu¹⁰⁸: konflik berlangsung terus dengan bentuk perang gerilya; Polri dan TNI bertindak keras; penyelesaian damai dengan masing-masing pihak dengan duduk berunding dan mematuhi semua hasil perundingan.

Pihak-pihak berkonflik sepakat dengan pilihan ketiga dengan syarat bahwa pemerintah akan memfasilitasi perundingan. Setelah Jusuf Kalla mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, Menko Polkam dan Kapolri yang menetapkan bahwa pada 18 hingga 21 Desember 2001 akan diadakan perundingan damai di Malino. Pada 20 Desember 2001, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mendatangi kedua pihak yang bertikai dan membawa mereka ke Malino, Kabupaten Gowa untuk deklarasi perdamaian yang mengikat kedua pihak.

¹⁰⁷ Hamid Awaludin, *Perdamaian Ala JK*, Jakarta, Gasindo, 2009, hal. 06.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 07.

Strategi perdamaian di Poso melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah dan instansi lainnya. Proses menggali informasi tentang substansi yang menjadi pertikaian dan tokoh kuncinya merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan konflik melalui rekonsiliasi.

Adapun agenda pertemuan yang akan dilaksanakan setelah perundingan selesai, yaitu ¹⁰⁹: di bidang keamanan, seperti penghentian konflik fisik; penyerahan senjata; penarikan kelompok/pimpinan dari luar, di bidang sosial ekonomi berupa pengembalian pengungsi; rehabilitasi sarana/perumahan, di bidang hukum berupa sanksi pelanggaran; pelaksanaan proses hukum, di bidang sosial politik berupa penyelesaian sosial politik.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 14-15.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rekonsiliasi merupakan proses penyelesaian konflik yang digunakan untuk melihat efektivitas proses penyelesaian konflik antara Afghanistan dan Pakistan dengan dua alasan. Pertama, konflik antara Afghanistan dan Pakistan merupakan perang saudara yang melibatkan pihak eksternal. Afghanistan dan Pakistan adalah dua negara yang memiliki banyak persamaan, yaitu: satu daratan di bawah kekuasaan kerajaan Mughal; menggunakan perbatasan (*Durand Line*) yang sama; etnis Pustun merupakan etnis terbanyak di kedua negara. Untuk itu diperlukan penyelesaian konflik dengan cara non-kekerasan melalui rekonsiliasi.

Alasan kedua, konflik kedua negara telah menimbulkan banyak kerugian, seperti penggunaan sumber daya alam oleh pihak yang berkonflik; anggaran belanja militer banyak yang dikeluarkan untuk membiayai pasukan dan membeli senjata demi keamanan wilayah masing-masing negara. Sehingga, penyelesaian konflik dengan menggunakan jalur kekerasan seperti gencatan senjata dan pengiriman pasukan dalam *peace-keeping* tentu akan menelan biaya yang besar. Untuk itu diperlukan penyelesaian konflik dengan cara non-kekerasan melalui proses rekonsiliasi sebagai bagian dari *peace-making* dan *peace-building*.

2. Untuk mengukur efektivitas dari proses rekonsiliasi di Afghanistan dan Pakistan, maka diperlukan beberapa indikator. Pertama adalah Dialog. Dialog adalah inti dari resolusi konflik untuk mencapai perdamaian. Meskipun resolusi konflik menggunakan cara kekerasan (*peace-keeping*) sebelum berdialog dengan tujuan untuk menghentikan konflik, namun rekonsiliasi termasuk ke dalam bagian dari resolusi konflik. Rekonsiliasi menggunakan cara non-kekerasan, seperti dialog. Selain *peace-making*, rekonsiliasi juga berada dalam bentuk *peace-building* dengan tujuan mencapai perdamaian positif. Kedua, Semua Pihak sama-sama Menang atau dikenal dengan istilah ‘menang-menang’. Proses rekonsiliasi mengutamakan kedua pihak dalam mendapatkan apa yang diinginkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Ketiga, Proses Tindak Lanjut atau dikenal dengan istilah *follow up*. Proses rekonsiliasi tidak berakhir setelah kesepakatan atau aturan telah disepakati melalui dialog. Rekonsiliasi berlanjut hingga pada pengimplementasian dari aturan-aturan tersebut, seperti pemulihan di berbagai bidang: sosial; ekonomi; politik dan hukum. Hal ini membuktikan bahwa rekonsiliasi merupakan bagian dari *peace-building* yang bertujuan mengubah kondisi pedamaian negatif menjadi perdamaian positif. Keempat, *Trust* atau kepercayaan. sikap saling percaya harus dimiliki oleh pihak-pihak yang ingin membangun hubungan damai. *Trust* diperoleh dari pengakuan atas kesalahan; meminta maaf dan memaafkan. Adapun penyelesaian konflik antara Afghanistan dan Pakistan

kurang berpegang pada indikator *Trust* dan Semua Pihak sama-sama Menang. Kecurigaan, saling tuduh di antara kedua negara, serta banyaknya elit politik yang memiliki kepentingan berbeda dalam konflik. Sedangkan kedua indikator lainnya, Dialog dan Proses Tindak Lanjut, terpenuhi dalam penyelesaian konflik Afghanistan dan Pakistan. Jadi, proses rekonsiliasi telah ada dalam penyelesaian konflik antara Afghanistan dan Pakistan, namun masih dalam pelaksanaannya kurang efektif. Penyelesaian konflik Afghanistan dan Pakistan menemui beberapa faktor hambatan untuk mencapai proses rekonsiliasi. Faktor pertama adalah rekonsiliasi yang dilakukan secara berulang kali ketika konflik kembali meletus. Faktor kedua adalah konflik elit politik di Afghanistan, di mana faksi-faksi politik terlibat konflik internal serta tidak memiliki legitimasi politik yang disandarkan pada identitas kesukuan (*tribal*). Faktor ketiga adanya gangguan sosial dalam masyarakat kedua negara yang disebabkan oleh berbagai serangan yang terjadi selama konflik, rasa tidak aman serta *trauma* masyarakat di kedua negara.

B. Saran

1. Hendaknya semua aktor yang terlibat dalam konflik, baik itu dari pihak Afghanistan dan Pakistan, Taliban, kelompok mujahidin hingga kelompok masyarakat untuk bertemu, duduk bersama dan membicarakan kepentingan masing-masing pihak. Setelah itu dirumuskan satu *draft* resolusi sebagai hasil dari perundingan damai. Hal ini untuk menghindari rekonsiliasi yang dilakukan berulang kali. Jika hanya pemerintah kedua negara yang sepakat untuk damai saat ini, maka di waktu selanjutnya akan muncul serangan-serangan kecil di berbagai wilayah kedua negara. Dialog yang melibatkan seluruh pihak-pihak yang memiliki dendam maupun kepentingan hendaknya dipertemukan dalam satu ruang tanpa ada intervensi dari negara atau pihak lain, kecuali sebagai mediator.
2. Semua pihak hendaknya mengungkapkan kesalahannya selama konflik dan berjanji tidak akan mengulangi, meminta maaf dan memaafkan. Munculnya sikap saling percaya dengan mudah untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, yaitu: pembenahan infrastruktur, seperti pasar dan sekolah; kerja sama ekonomi; pemulihan kondisi politik dan aparatur negara dan pemulihan di bidang sosial.
3. Semua pihak hendaknya dapat menjaga komitmen untuk bekerja sama dan menjaga hubungan baik sebagai hasil dari proses rekonsiliasi jika di waktu yang akan datang dapat berjalan dengan efektif. Sehingga, perdamaian positif dan keadilan (*justice*) dapat tercapai di masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Ruslam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Awaludin, Hamid. 2009. *Perdamaian Ala JK: Poso Tenang, Ambon Damai*. Jakarta: Gasindo.
- Boege, Volker, “Traditional Approaches to Conflict Transformation — Potentials and Limits”, Handbook, *Berghof Research Center for Constructive Conflict Management*.
- Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, Beth A Simmons. *Handbook Hubungan Internasional*. Terj. Imam Baehaqie. 2013. Bandung: Nusa Media.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darby, John dan Roger Mac Ginty (Editor). 2003. *Contemporary Peacemaking: Conflict, Violence and Peace Processes*. London: Palgrave Macmillan.
- Dwi Susilo, Rahmat K. 2008. *20 Tokoh Sosiologi Modern, Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Francis, Diana. 2002. *People, Peace and Power: Conflict Transformation in Action*. London: Pluto Press.
- Galtung, Johan. 1996. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: SAGE.
- Liliweri, Allo. 2005. *Pransangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya dan Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Maley, William (Editor). 1999. *Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan*. Terj. Samson Rahman. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramsbotham, Oliver, Woodhouse dan Hugh Miall. 2011. *Contemporary Conflict Resolution*. Third Edition. New York: Polity.
- Rozi, Syafuan, Dhurorudhin Mashad, Emilia Yustiningrum, dkk. 2006. *Kekerasan*

- Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rudi , T. May. 2003. *Hubungan Internasional kontemporer dan Masalah-masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Edisi Pertama. Cet. ke-2. Jakarta: Prenada Media Group.
- Siddiqui, Anjum (Editor). 2008. *India and South Asia: Economic Developments in The Age of Globalization*. India: Pentagon Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. ke-44. Jakarta : Rajawali Press.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Edisi Pertama. Cet. ke-1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Veeger, K. J. 1986. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Cet. ke-2. Jakarta: PT. Gramedia.
- Webel, Charles dan Johan Galtung (Editor). 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge.
- Yulius Hermawan. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dokumen/Kamus/Ensiklopedia/Atlas

- Brasseur, Brad L, "Recognizing the Durand Line, A Way Afghanistan and Pakistan ?" *East West Institute*. 2011 , (<http://www.ewi.info/sites/default/files/ideas-files/durandline.pdf>.), diakses pada 14 April 2015).
- Encyclopedia International*. 1970. Canada: Grolier Incorporated. Manufactured in United States by American Book-Stratford Press, Inc., New York, N.Y.
- Evans, Graham dan Jeffery Newnham. 1990. *The Dictionary of World Politics : A Reference Guide to Concepts, Ideas and Institutions*. Cambridge: The University Press.
- Heritage, Andrew, David Robert dan Roger Bullen. 2004. *Atlas Dunia: Referensi Terlengkap*. Edisi Keempat. Penerbit Erlangga.

- Longman Dictionary of Contemporary English for Advanced Learners*. 2009. Edisi Kelima. UK: Pearson.
- Longman Dictionary of English Language and Culture*. 2000. Edisi ketiga. UK: Pearson.
- Monitor Civil-Military Relations in Pakistan*. Mei, 2015. Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency (PILDAT). (http://www.pildat.org/Publications/publication/CMR/MonitorOnCivil-MilitaryRelationsinPakistan_May012015_May312015.pdf), diakses pada Selasa, 19 Januari 2016, pukul 11:17 WITA.
- Oxford Advanced Learner's Dictionary*. 1995. Editor: Jonathan Crowther. Edisi kelima. Oxford University Press.
- Rahunahndoko, I.P.M. B.A. Juni, 2006. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Cet.ke-4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Report of The Senate Committee on Defence and Defence Production: Visits to Afghanistan & Azerbaijan*. September-Oktober 2013. Report 7. Senate of Pakistan. (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:la93rq-lAPoJ:www.senate.gov.pk/uploads/documents/1387174317_852.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id), Sabtu, 30 Januari, 2016, pukul 07:25 WITA.
- Vanda Felbab-Brown. 2015. *Pakistan's Relations with Afghanistan and Implications for Regional Politics*. The National Bureau of Asian Research : NBR Special Report Forthcoming. (http://www.nbr.org/publications/specialreport/pdf/free/SR_Felbab-Brown_May2015.pdf), diakses pada Rabu, 30 Desember, pukul 14:48 WITA.
- Ulid, Chairul. 2012. "Mengelola Konflik" : Bagian 1 Analisis (Simon Fisher, Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak)". Pdf. UB: Lecture. (<http://chairululid.lecture.ub.ac.id/files/2012/06/Evaluasi-Perencanaan-13-Manajemen-Konflik-A1.pdf>), diakses pada 22 April 2015.

Jurnal dan Artikel

- Alexander, J. Their. 04 Januari 2008. *On The Issues: Afghanistan/Pakistan*. (<http://www.usip.org/publications/the-issues-afghanistanpakistan>), diakses pada Sabtu, 02 Januari 2016, pukul 15:36 WITA.

Bajoria, Jayshree. 2009. "The Troubled Afghan-Pakistani Border". *Council on Foreign Relations*,
(<http://www.cfr.org/pakistan/troubled-afghan-pakistani-border/p14905>), diakses pada Sabtu, 02 Januari 2016, pukul 15:14 WITA.

Raharjo, Sandy Nur I. 2014. "Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik Antar Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste pada 2012-2013". *Jurnal Pertahanan*, Maret 2014, Volume 4, Nomor 1 155,
(<http://idu.ac.id/index.php/publikasi/jurnalpertahanan/artikeljurnal?download=18:sandyrarajo>), diakses pada Jumat 11 September 2015, pukul 10:35 WITA.

Situs

a. Council on Foreign Relations

b. Bakhtar News Agency

CE Meets Khyber-Pakhtunkhwa Quetta Political Leaders. 30, November, 2015. Bakhtar News Agency.
(<http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/20066-ce-meets-khyber-pakhtunkhwa-quetta-political-leaders.html>), diakses pada Kamis, 02 Desember 2015, pukul 11:39 WITA.

President Ghani Meets Chinese Special Envoy On Afghanistan, Pakistan. 10, November, 2015. Bakhtar News Agency.
(<http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/19776-president-ghani-meets-chinese-special-envoy-on-afghanistan-pakistan.html>), diakses pada Kamis, 03 Desember 2015, pukul 12:27 WITA.

President Ghani Meets U.S. Congressmen, Khyber Pakhtunkhwa Politicians. 28, November, 2015. Bakhtar News Agency.
(<http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/20017-president-ghani-meets-us-congressmen-khyber-pakhtunkhwa-politicians.html>), diakses pada Kamis 03 Desember 2015, pukul 11:48 WITA.

President Ghani, PM Sharif Agree To Revive Stalled Peace Talks With Taliban. 02, Desember, 2015. Bakhtar News Agency.
(<http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/20108-president-ghani-pm-sharif-agree-to-revive-stalled-peace-talks-with-taliban.html>), diakses pada Kamis, 03 Desember 2015, pukul 11:22 WITA.

Sartaj Aziz. The Advisor of The Prime Minister of Pakistan Once Again Talks About Peace In Afghanistan. 18, November, 2015. Bakhtar News Agency (<http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/19908-sartaj-aziz-the-advisor-of-the-prime-minister-of-pakistan-once-again-talks-about-peace-in-afghanistan.html>), diakses pada Kamis, 03 Desember 2015, pukul 12:00 WITA.

c. BBC UK

Afghanistan profile - Timeline. BBC UK.
(<http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12024253>), diakses pada 22 Desember 2015.

Pakistan profile - Timeline. BBC UK.
(<http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12966786>), diakses pada 22 Desember 2015.

d. BBC.com

Afghanistan Country Profile. 8, Oktober, 2015. BBC.com
(<http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12011352>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 22:50 WITA.

Pakistan Country Profile. 11, Oktober, 2015.
(<http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12965779>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 23:36 WITA.

e. CIA.gov, World Factbook

CIA.gov. World Factbook.
(<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html>), diakses pada Selasa, 22 Desember 2015, pukul 15:22 WITA.

CIA.gov. World Factbook
(<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html>), diakses pada Selasa, 22 Desember, pukul 15:22 WITA.

f. Daily Times

Taqi, Mohammad. 21, Mei, 2015. "Pak-Afghan relations: war is peace?". *Daily*

Times. (<http://www.dailytimes.com.pk/opinion/21-May-2015/pak-afghan-relations-war-is-peace>), diakses pada Selasa, 19 Januari 2016, pukul 10:34 WITA.

g. Dawn News

Haider, Matin. 14, November, 2014. "Afghan president assures Pakistan of anti-terror cooperation". *Dawn News*. (<http://www.dawn.com/news/1144446>), diakses pada Selasa, 05 Januari 2016, pukul 11:27 WITA.

Mudassir, Syed Ali Shah. 26, Mei, 2016. "Security Deal". *Dawn News*. (<http://www.dawn.com/news/1184207>), diakses pada Selasa, 05 Januari 2016, pukul 11:24 WITA.

Pakistan, Afghanistan to enhance trade ties. 24, Februari, 2014. *Dawn News*. (<http://www.dawn.com/news/1089063>), diakses pada Selasa, 05 Januari 2016, pukul 11:10 WITA.

h. Maps of World

Maps of World. (<http://www.mapsofworld.com/afghanistan/>), diakses Minggu, 29 November 2015, pukul 23:06 WITA.

Maps of World. (<http://www.mapsofworld.com/afghanistan/afghanistan-border.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 23:23 WITA.

Maps of World. (<http://www.mapsofworld.com/afghanistan/afghanistan-ethnic-groups-map.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 23:25 WITA.

Maps of World. (<http://www.mapsofworld.com/afghanistan/afghanistan-history.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 23:35 WITA.

Maps of World. (<http://www.mapsofworld.com/afghanistan/afghanistan-political-map.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 23:07 WITA.

Maps of World. (<http://www.mapsofworld.com/pakistan/>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 11:12 WITA.

Pakistan Political Map. *Maps of World*. (<http://www.mapsofworld.com/pakistan/pakistan-political-map.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 23:21 WITA.

Pakistan Geography. Maps of World.

(<http://www.mapsofworld.com/pakistan/geography.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 11:17 WITA.

Pakistan Political Map. Maps of World.

(<http://www.mapsofworld.com/pakistan/pakistan-political-map.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 23:21 WITA.

i. Ministry of Foreign Affairs Islamic Republik of Afghanistan

Afghanistan-Pakistan Joint Statement Issued in Islamabad on the occasion of the visit of Afghan Foreign Minister, Mr. Zalmi Rassoul. 29, Januari, 2011. *Ministry of Foreign Affairs of Islamic Republic of Afghanistan*.

(<http://mfa.gov.af/en/news/2974>), diakses pada Kamis, 21 Januari 2016, pukul 17:18 WITA.

j. Pajhwok News

Afghan and Pakistani parliamentarians. 14, September, 2013. Pajhwok News.

(<http://www.pajhwok.com/en/photo/212567>), diakses pada Sabtu, 30 Januari 2016, pukul 07:36 WITA.

Shah, Ahmad Erfanya. 24, Mei, 2015. "NDS-ISI Deal Being Reviewed CEO Office". *Pajhwok News*.

(<http://www.pajhwok.com/en/2015/05/24/nds-isi-deal-being-reviewed-ceo-office>), Kamis, 21 Januari 2016, pukul 17:45 WITA.

k. The Guardian

Afghanistan and Pakistan thaw relations with pledge to fight terrorism together. Mei, 2015. The Guardian.

(<http://www.theguardian.com/world/2015/may/12/afghanistan-and-pakistan-thaw-relations-with-pledge-to-fight-terrorism-together>), diakses pada Selasa, 19 Januari 2016, pukul 11:00 WITA.

Skripsi dan Tesis

Andi Nurmadina. 2012. *Resolusi Konflik Pasca Pilkada Tahun 2010 di Kabupaten Gowa*. Makassar: Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dita Herdiyanti. 2013. *Peranan UNOCI (United Nations Operation In Cote*

D'Ivoire) Dalam Penyelesaian Konflik Pasca Pemilu 2010 di Pantai Gading. Makassar: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Muhammad Ashar. 2012. *Konflik Sosial Antar Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Teknik dan Mahasiswa Fakultas Sospol di Universitas Hasanuddin).* Makassar: Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Megawati. 2008. *Gerakan Separatis Pattani sebagai Faktor Konflik dan Pengaruhnya Terhadap Aspek Keamanan di Thailand.* Makassar: Program Reguler Sore, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Ngesti Viana. 2010. *Konflik Internal Tim Sukses Partai Golkar pada Pemilihan Bupati Luwu Utara Tahun 2010.* Makassar: Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Ismar Hamid. 2015. *Konflik Agraria dan Jalan Keluarnya (Studi Kasus Konflik Antara PTPN XIV dengan Masyarakat Polongbangkeng Takalar dan Keera Wajo).* Makassar: Pascasarjana Sosiologi Universitas Hasanuddin.

Wawancara

dr. Farid Husain, Sp.B, KBD., (Wawancara, tanggal 15 Februari 2016)

Prof. Dr. A. Gau Kadir, M.A., (Wawancara, tanggal 23 November 2015)

Prof.Dr. M. Basir Syam, M.Ag. , (Wawancara, tanggal 30 November 2015)

Video

India welcomes Pakistan election result, Afghanistan hopes for better relations. 12, Mei, 2013. Video. Reuters.
(<http://www.reuters.com/video/2013/05/12/india-welcomes-pakistan-election-result?videoId=242747752>), diakses pada Selasa, 19 Januari 2016, pukul 10:18 WITA.

Website

Afghan president welcomes investment by Nishat Group. 15, Mei, 2015.
Pakistan Today.

(<http://www.pakistantoday.com.pk/2015/05/15/business/afghan-president-welcomes-investment-by-nishat-group/>), Kamis, 21 Januari 2016, pukul 17:33 WITA.

Anonim. 2014. "10 Kerajaan Terbesar Dunia dalam Sejarah". *Media Online News*.
(<http://mediaonlinenews.com/dunia/10-kerajaan-terbesar-dunia-dalam-sejarah>), diakses pada 22 April 2015.

AS Desak Rekonsiliasi Sri Lanka. ANTARA News.
(<http://www.antaranews.com/print/212783/as-desak-rekonsiliasi-sri-lanka>), diakses pada Minggu, 24 Januari 2016, pukul 22:49 WITA.

Berlianto. 10, Agustus, 2015. "Afghanistan Minta Pakistan Tindak Tegas Kelompok Taliban", *International Sindo News*.
(<http://international.sindonews.com/read/1031504/40/afghanistan-minta-pakistan-tindak-tegas-kelompok-taliban-1439223506>), diakses pada Senin, 14 September 2015.

_____. 04, September, 2015. "Penasehat Keamanan Pakistan Sambangi Afghanistan", *International Sindonews*,
(<http://international.sindonews.com/read/1040907/40/penasehat-keamanan-pakistan-sambangi-afghanistan-1441381178>), diakses pada Jumat, 04 September 2015.

Hasrat-Nazimi, Waslat. 22, Januari, 2011. "Turki Jadi Penengah Sengketa Afghanistan-Pakistan". *VOA Indonesia*.
(<http://www.voaindonesia.com/content/presiden-afghanistan-akan-bertemu-presiden-pakistan-di-istanbul-132985988/100183.html>), diakses pada Jumat, 04 September 2015.

_____. 15, Juni, 2012. "Afghanistan Merupakan Kunci Stabilitas di Kawasan", *DW.com*.
(<http://www.dw.com/id/afghanistan-merupakan-kunci-stabilitas-di-kawasan/a-16028464>), diakses pada Jumat, 04 September 2015.

_____. Januari. 2013. "Taliban Manfaatkan Celah Keamanan". *DW Akademie*.
(<http://www.dw.de/taliban-manfaatkan-celah-keamanan/a-16540004>), diakses pada 14 April 2015.

Pakistan. (<http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/332/340324/profiles.html>), diakses pada Minggu, 29 November 2015, pukul 22:40 WITA.

Pertemuan trilateral antara Afghanistan, AS dan Pakistan. 23, April, 2013. VOV World.
(<http://vovworld.vn/id-id/Berita/Pertemuan-trilateral-antara-Afghanistan-AS-dan-Pakistan/150340.vov>), diakses pada Minggu, 24 Januari 2016, pukul 22:02 WITA.